

BAB I

Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005;
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang APBD Tahun 2014
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor III Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 43 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.



Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2015 meliputi hal-hal berikut :

I. PENDAHULUAN

- I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- I.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pendapatan – LO
 - 5.1.4 Beban
 - 5.1.5 Aset
 - 5.1.6 Kewajiban
 - 5.1.7 Ekuitas Dana



5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

VII. PENUTUP

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

I. Ekonomi Makro

Berdasarkan pernyataan misi ke 4 pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat “Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global”, sesuai dengan tugas dan fungsi BKPM Sumatera Barat adalah berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi. Dalam meningkatkan iklim investasi, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Mengembangkan pemberian insentif bagi para investor.
2. Meningkatkan informasi peluang investasi bagi calon investor
3. Mengembangkan pelayanan satu pintu yang prima dalam penanaman modal.

Dalam Rencana Kerja BKPM & PPT Sumatera Barat Tahun 2016, tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi BKPM & PPT Sumatera Barat, dalam jangka waktu I (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan koordinasi, pelayanan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal serta perumusan kebijakan yang mendukung investasi.
2. Meningkatkan pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi yang efektif.
3. Meningkatkan analisa potensi sumber daya dan penyediaan data dan informasi penanaman modal yang akurat.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu.

Tujuan yang akan dicapai tersebut dijabarkan dalam sasaran yang akan dicapai BKPM dan PPT Provinsi Sumatera Barat dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Investasi di Sumatera Barat :
 - Jumlah persetujuan investasi sebanyak 123 persetujuan pada Tahun 2016, yang terdiri dari 83 untuk PMDN dan 40 untuk PMA



- Jumlah realisasi PMDN sebesar 3.795.575,50 juta rupiah dan realisasi PMA sebesar 79.268,10 ribu US\$ pada Tahun 2016.
- 2. Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Sumatera Barat sebanyak 193 investor pada Tahun 2016 dan jumlah kesepakatan investasi sebanyak 5 MoU pada tahun 2016.
- 3. Tersedianya analisa potensi sumberdaya sebanyak 1 kajian pada Tahun 2016 serta data dan informasi penanaman modal yang akurat.
- 4. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BKPM dan PPT Sumatera Barat Tahun 2016 telah disusun Rencana Kerja dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2016.

2. Kebijakan Keuangan

2.1. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan keuangan BKPM dan PPT Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2016 adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan menentukan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja operasi maupun modal melalui penghematan yang diiringi dengan rasionalisasi anggaran. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan walaupun ada perubahan pada fisik barang jasa dan bangunan dalam DPPA 2016. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat dan investor baik dalam maupun luar negeri.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.
- Meningkatkan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi serta mewujudkan pengelolaan yang transparansi serta efektifitas dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

2.2. Pencapaian Target Kinerja

Penyusunan anggaran BKPM dan PPT Tahun 2016, ditempuh pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 12 (dua belas) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terwujudnya kelancaran surat menyurat kantor selama satu tahun.
2. Terjaminnya fasilitas komunikasi, teknologi informasi dan listrik kantor selama satu tahun.
3. Terpeliharanya kebersihan kantor selama satu tahun.
4. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis Badan untuk satu tahun.
5. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor untuk satu tahun.
6. Terjaminnya fasilitas komunikasi, teknologi informasi, dan listrik kantor.
7. Meningkatnya sarana perkantoran sebanyak 4 (empat) macam.
8. Bertambahnya wawasan Pejabat Eselon II dan III terkait berita terkini.
9. Lancarnya pelaksanaan rapat kantor selama satu tahun.
10. Meningkatnya Koordinasi/Sinkronisasi dengan lembaga terkait melalui rapat dan pertemuan dalam dan luar daerah selama satu tahun.
11. Terwujudnya ketertiban dan keamanan kantor
12. Terbentuknya mental dan fisik aparatur yang sehat.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 8 (delapan) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan sarana meubeleur kantor sebanyak 24 (dua puluh empat) unit.
2. Meningkatnya kelancaran tugas melalui penyediaan komputer dan kelengkapannya sebanyak 4 (empat) unit.
3. Meningkatnya kelancaran sarana komunikasi dan informasi sebanyak 1 set.
4. Meningkatnya kualitas Gedung Kantor sebanyak 1 (satu) unit.

5. Lancarnya mobilitas operasional kantor sebanyak 4 (empat) unit roda empat dan 2 (dua) roda dua selama satu tahun.
6. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 55 (lima puluh lima) unit.
7. Meningkatnya fungsi sarana meubeleur kantor sebanyak 12 unit.
8. Terwujudnya pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian aset secara efektif dan efisien selama satu tahun.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya. Indikator pencapaian target kinerjanya: terwujudnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas, sebanyak 58 stel.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dimaksudkan agar adanya peningkatan kompetensi aparatur penanaman modal setelah mengikuti berbagai bimbingan teknis, workshop, pelatihan dan sosialisasi penanaman modal baik didalam Propinsi maupun diluar Propinsi untuk 20 (dua puluh) aparatur tahun ini.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi terkait pencapaian kinerja SKPD sebanyak 3 (tiga) macam laporan.
2. Terlaksananya program/kegiatan SKPD sebanyak 4 dokumen selama satu tahun.
3. Terwujudnya tertib administrasi keuangan selama satu tahun.
4. Terlaksananya pertanggungjawaban keuangan SKPD sebanyak 2 macam laporan.

F. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 8 (delapan) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

1. Tercapainya solusi pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat, sebanyak 3 PMA/PMDN, 4kali



2. Adanya pemahaman aparaturnya Provinsi, Kabupaten/Kota, dunia usaha dan tokoh masyarakat tentang kebijakan di bidang Penanaman Modal sebanyak 85 orang.
3. Adanya pemahaman perusahaan terkait pengisian LKPM sebanyak 60 orang.
4. Adanya solusi terhadap permasalahan investasi di Sumatera Barat sebanyak 2 solusi.
5. Adanya pemberian insentif penanaman modal bagi investor di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan I aturan.
6. Tersedianya data perkembangan realisasi investasi fasilitas dan non fasilitas Sumatera Barat bagi pengambil kebijakan dan dunia usaha sebanyak 19 Kabupaten/Kota.
7. Adanya penyampaian LKPM oleh perusahaan PMA/PMDN dan pelaksanaan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 12 perusahaan.
8. Adanya kemudahan bagi investor di dalam pengurusan Izin Usaha Tetap dan terlaksananya pencabutan SP bagi perusahaan yang macet sebanyak 10 perusahaan.
9. Meningkatnya jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat sebanyak 20 calon investor.
10. Meningkatnya jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat sebanyak 5 calon investor.
11. Adanya kesepakatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK sebanyak 3 kesepakatan.
12. Terwujudnya MoU/Lol pada dua sektor sebanyak 2 MoU/Lol.
13. Tersedianya sistem informasi spasial penanaman modal Sumatera Barat sebanyak 1 unit.
14. Tersedianya bahan materi promosi untuk calon investor sebanyak 4 bahan materi
15. Memudahkan investor/calon investor memperoleh data dan informasi potensi dan peluang investasi 19 Kabupaten/Kota
16. Memudahkan investor/calon investor memperoleh FS proyek investasi sektor industri sebanyak 1 kajian.
17. Adanya percepatan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus.
18. Adanya pemahaman aparaturnya Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang penyelesaian permasalahan investasi sebanyak 50 orang.
19. Meningkatnya koordinasi promosi dan fasilitasi investasi sebanyak 7 Kabupaten/Kota.
20. Adanya harmonisasi perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal sebanyak 19 Kabupaten/Kota.



21. Tersedianya data realisasi investasi PMA/PMDN di Sumatera Barat sebanyak 19 Kabupaten/Kota.

G. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

1. Persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu 100%.
2. Adanya penguatan kelembagaan dan pembinaan PTSP di Sumatera Barat di 19 Kabupaten/Kota.
3. Adanya pemahaman aparatur terkait penyelenggaraan PTSP sebanyak 9 orang.

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

I. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat merencanakan Belanja sebesar Rp. 8.838.488.705,00 yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan), yang direncanakan untuk membiayai:

- Belanja Pegawai Rp. 4.308.747.705,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.845.714.500,00
- Belanja Modal Rp. 684.026.500,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

Total realisasi belanja BKPM dan PPT Sumatera Barat dalam tahun anggaran 2016 tercatat sebesar Rp. 8.284.623.544,00. Jumlah tersebut mencapai 93,73% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 8.838.488.705,00. Meskipun realisasi seluruh komponen belanja daerah berada dibawah anggaran namun sudah memenuhi prinsip 3E. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp.4.197.541.104,00 atau 97,42%, belanja barang dan jasa sebesar Rp.3.522.765.940,00 atau 91,60% dan belanja modal sebesar Rp.564.316.500,00 atau 82,50% dari jumlah anggarannya.

2. Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 diperoleh realisasi Pendapatan BKPM dan PPT Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 733.605.720,00. Pendapatan ini dari realisasi retribusi daerah yang dikelola oleh BKPM dan PPT yang terdiri dari Izin Perikanan sebesar Rp. 32.793.720,00 dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sebesar Rp. 700.812.000,00. BKPM dan PPT Provinsi Sumatera Barat menganggarkan pendapatan yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah mulai tahun 2016 ini sebesar Rp. 617.000.000,00 dengan rincian Izin Perikanan sebesar Rp. 12.000.000,00 dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing sebesar Rp. 605.000.000,00.

3. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
B	BELANJA	8.838.488.705,00	8.284.623.544,00	93,73	553.865.161,00
I	BELANJA OPERASI	8.154.462.205,00	7.720.307.044,00	94,68	434.155.161,00
I	Belanja Pegawai	4.308.747.705,00	4.197.541.104,00	97,42	111.206.601,00
2	Belanja Barang dan Jasa	3.845.714.500,00	3.522.765.940,00	91,60	322.948.560,00
II	BELANJA MODAL	684.026.500,00	564.316.500,00	82,50	119.710.000,00
I	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	684.026.500,00	564.316.500,00	82,50	119.710.000,00

Seluruh realisasi belanja BKPM dan PPT Sumatera Barat pada tahun 2016 mencapai 93,73% dari yang dianggarkan. Realisasi belanja tiap program dan kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA BKPM dan PPT tahun 2016 adalah sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran sebesar Rp. 808.205.748,00 dan realisasi Rp. 755.527.216,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 93,48%, hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

I. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran Rp. 21.665.000,00 dan realisasi Rp.19.905.051,00 atau sebesar 91,88%. Kegiatan Jasa Penyediaan Surat Menyurat dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor dalam pelayanan jasa surat menyurat. Seluruh kebutuhan akan penyelesaian surat menyurat kantor selama tahun 2016 dan penyusunan beberapa laporan berbagai kegiatan rutin serta surat dinas lainnya dapat terpenuhi.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran Rp. 213.681.500,00 dan realisasi Rp. 180.284.714,00 atau sebesar 84,37%. Kegiatan ini dimaksudkan agar sarana komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet kantor dapat

digunakan untuk mendukung aktifitas kantor. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi telepon, listrik dan internet kantor selama tahun 2016.

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Anggaran Rp. 87.750.000,00 dan realisasi Rp. 87.256.175,00 atau sebesar 99,44%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor meliputi penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dan lingkungan kantor. Selama Tahun 2016 penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dapat terwujud pada kantor BKPM dan PPT .Sumatera Barat

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Anggaran Rp. 32.000.000,00 dan realisasi Rp. 31.641.000,00 atau sebesar 98,88%. Penyediaan alat tulis kantor selama tahun anggaran 2016 dapat dilaksanakan, bahkan menyisakan persediaan untuk tahun anggaran berikutnya.

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran Rp. 21.000.000,00 dan realisasi Rp. 19.580.500,00 atau sebesar 93,24%. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama tahun anggaran 2016 beberapa macam dapat dilaksanakan, dan menyisakan persediaan untuk digunakan tahun anggaran berikutnya.

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran Rp. 7.500.000,00 dan realisasi Rp. 7.498.000,00 atau sebesar 99,97 %. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama tahun anggaran 2016 dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan target yang ditetapkan.

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran Rp. 62.800.000,00 dan realisasi Rp. 52.583.000,00 atau sebesar 83,73%. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama tahun anggaran 2016 terdiri dari 5 (lima) unit AC dan 3 (tiga) unit tabung racun api dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan target yang ditetapkan.

8. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran Rp. 13.200.000,00 dan realisasi Rp.12.000.000,00 atau sebesar 90,91%. Dari kegiatan ini dapat disediakan bacaan berupa surat kabar/koran harian lokal sebanyak 3600 eksemplar koran lokal dan 360 eksemplar koran nasional.

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Anggaran Rp. 16.064.500,00 dan realisasi Rp. 15.680.000,00 atau sebesar 97,61%. Penyediaan makanan dan minuman rapat selama tahun 2016 dapat disediakan. Penyediaan makanan dan

minuman rapat pelaksanaannya sesuai dengan agenda rapat yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

Anggaran Rp. 234.911.000,00 dan realisasi Rp. 232.725.318,00 atau sebesar 99,07 %. Selama tahun anggaran 2016 BKPM dan PPT mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah sesuai undangan serta event kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

II. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

Anggaran Rp 82.633.748,00 dengan realisasi Rp. 82.323.458,00 atau sebesar 99,62%. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan yaitu pembayaran jasa pengamanan kantor, penyediaan pakaian kerja pengaman kantor dan makan minum harian petugas pengaman kantor.

12. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Anggaran Rp. 15.000.000,00 dan realisasi Rp. 14.050.000,00 atau sebesar 93,67%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan fisik dan mental aparatur dengan menyediakan jasa instruktur senam dan jasa penceramah agama bagi aparatur BKPM dan PPT agar dapat mengikuti senam pagi dan wirid pengajian agama di kantor setiap minggu. Pada kegiatan ini tidak terpenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu pelaksanaan senam pagi dan wirid pengajian bagi aparatur di kantor yang direncanakan sebanyak 15 kali dan 48 kali pertemuan.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran sebesar Rp. 808.506.500,00 dan realisasi Rp. 686.940.484,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 84,96% hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya, dengan rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

I. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Anggaran Rp. 388.676.500,00 dan realisasi Rp. 388.676.500,00 atau 100%. Kegiatan ini terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan yaitu untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional I (satu) unit sesuai dengan kebutuhan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumbar.

2. Pengadaan Meubeleur

Anggaran Rp. 61.000.000,00 dan realisasi Rp. 61.000.000,00 atau 100%. Kegiatan ini terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan yaitu untuk pembelian/pengadaan meubeleur yaitu 10

unit meja kerja, 10 unit kursi kerja, dan 4 unit lemari arsip sesuai dengan kebutuhan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumbar.

3. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Anggaran Rp. 124.250.000,00 dan realisasi Rp. 17.575.000,00 atau sebesar 14,14%. Kegiatan ini terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan dengan telah dilaksanakan pengadaan/pembelian 1 (satu) unit komputer PC, dan 2 (dua) unit printer. Realisasi kegiatan ini sangat rendah karena rasionalisasi anggaran.

4. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi

Anggaran Rp. 55.300.000,00 dan realisasi Rp. 51.370.000,00 atau sebesar 92,89%. Kegiatan ini terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan dengan telah dilaksanakan pengadaan/pembelian 1 (satu) unit alat komunikasi telepon (PABX).

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Anggaran Rp. 50.000.000,00 dan realisasi Rp. 50.000.000,00 atau sebesar 100%. Telah dilaksanakan pemeliharaan gedung kantor sesuai dengan kebutuhan dan anggaran tersedia.

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Anggaran Rp. 70.000.000,00 dan realisasi Rp. 63.050.284,00 atau sebesar 90,07%. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional tahun 2016 dapat dipenuhi sesuai dengan target terpeliharanya sebanyak 5 (lima) unit kendaraan roda empat dan 2 unit kendaraan roda 2. Realisasi keuangan kegiatan pemeliharaan dilakukan sesuai kebutuhan dan jumlah kendaraan dinas pada Tahun 2016.

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran Rp. 28.500.000,00 dan realisasi Rp. 24.937.200,00 atau sebesar 87,50%. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain adalah pemeliharaan dan perbaikan AC, komputer, printer, mesin tik, infokus, dan CCTV sesuai dengan target yang ditetapkan.

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur.

Anggaran Rp. 6.000.000,00 dan realisasi Rp. 5.850.000,00 atau sebesar 97,50%. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur dialokasikan untuk 13 unit meubeleur kantor yang memerlukan pemeliharaan.

9. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

Anggaran Rp. 24.780.000,00 dan realisasi Rp. 24.481.500,00 atau sebesar 98,80 %. Kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD telah terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan, sebagian besar merupakan honorarium pengelola aset SKPD.

C. Program Peningkatan disiplin Aparatur

Anggaran sebesar Rp. 31.320.000,00 dan realisasi Rp. 31.320.000,00 atau sebesar 100%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

I. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan Sipil Harian (PSH)

Anggaran Rp. 31.320.000,00 dan realisasi Rp. 31.320.000,00 atau sebesar 100%. Telah dilaksanakan pengadaan pakaian dinas sebanyak 58 stel sesuai dengan target kinerja yakni sesuai dengan jumlah pegawai yang ada.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Anggaran sebesar Rp. 147.922.000,00 dan realisasi Rp. 147.777.000,00 atau sebesar 99,90%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

I. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Anggaran Rp. 147.922.000,00 dan realisasi Rp. 147.777.000,00 atau sebesar 99,90%. Telah diikutsertakannya sebanyak 26 orang pejabat/staf keluar provinsi dalam rangka pelatihan serta Bimbingan Teknis yang diadakan oleh BKPM, serta Instansi terkait lainnya.

F. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Anggaran sebesar Rp. 274.928.752,00 dan realisasi Rp. 243.863.750,00 atau sebesar 88,70%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

I. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran Rp. 16.900.000,00 dengan realisasi Rp. 16.895.000,00 atau sebesar 99,97%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target, yaitu tersusunnya 3 (tiga) macam laporan sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Bahan LKPJ Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD selama satu tahun.

2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Anggaran Rp. 62.308.752,00 dan realisasi Rp. 49.263.350,00 atau sebesar 79,06%. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD menyediakan dana untuk proses penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD dengan output tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, dan DPPA SKPD selama I (satu) tahun. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi pembuatan Renstra, Renja, RKA, DPA, dan DPPA SKPD.

3. Penatausahaan Keuangan SKPD

Anggaran Rp. 171.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 154.050.000,00 atau 89,93%. Telah terlaksananya penatausahaan keuangan untuk tahun 2016. Kegiatan ini merupakan penyediaan honor pengelola keuangan daerah, honor pengelola SIPKD dan honor pengelola SIMGAJI PNSD dan telah dibayar honor dimaksud sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Tahun 2016.

4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan

Anggaran Rp. 24.420.000,00 dan realisasi Rp. 23.655.400,00 atau sebesar 96,87%. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan menyediakan dana untuk proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD dengan output tersusunnya laporan keuangan semesteran dan tahunan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi pembuatan laporan keuangan Semester I 2016 dan laporan keuangan tahun 2016.

E Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Anggaran sebesar Rp. 1.788.798.000,00 dan realisasi Rp. 1.633.419.948,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 91,86% dan pada umumnya target kinerja dapat tercapai, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Permasalahan Investasi

Anggaran sebesar Rp. 79.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 61.146.400,00 atau sebesar 77,40 %. Untuk realisasi fisik capaiannya adalah sebesar 100%, bahkan secara kinerja keluaran dapat tercapai melebihi target.

2. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal

Anggaran sebesar Rp. 44.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 43.379.300,00 atau sebesar 97,92%, untuk realisasi fisik tercapai 100%.

Kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal ini dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi kebijakan/aturan di bidang penanaman modal kepada penyelenggara pemerintahan di kabupeten/kota, tokoh masyarakat dan dunia usaha.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah peserta yang mendapat sosialisasi kebijakan/regulasi terkait penanaman modal sebanyak 85 peserta (sesuai target) dengan hasil adanya pemahaman Aparatur Provinsi dan Kab/kota, dunia usaha dan tokoh masyarakat tentang kebijakan di bidang penanaman modal sebanyak 85 orang.

3. Bimbingan dan Penyuluhan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran sebesar Rp. 24.992.300,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.992.300,00 atau sebesar 100%, untuk realisasi fisik tercapai 100%, sesuai dengan target.

Maksud diadakannya Bimbingan dan Penyuluhan Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah agar penanam modal/perusahaan yang telah mendapatkan perizinan penanaman modal memahami tentang kewajiban dan tanggung-jawabnya sebagai penanam modal.

4. Forum Investasi Sumatera Barat

Anggaran sebesar Rp. 33.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 12.058.500,00 atau 36,54 %. Realisasi fisik hanya tercapai 65% disebabkan pelaksanaan forum investasi yang direncanakan 2 kali pertemuan hanya terlaksana 1 kali.

5. Penyusunan Insentif Penanaman Modal

Anggaran sebesar Rp. 15.100.000,00 terealisasi sebesar Rp. 13.458.050,00 atau 89,13%. Untuk realisasi fisiknya tercapai 100%. Kegiatan Penyusunan Insentif Penanaman Modal ini dimaksudkan agar pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Untuk menyusun kebijakan/aturan terkait pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
- b. Untuk menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat.

Adapun keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dapat tercapai sesuai target dan sudah disampaikan ke Biro Hukum melalui surat kepala BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat nomor: 570/671/Perenc-2016 pada tanggal 28 Desember 2016. Hasil kegiatan adalah adanya pemberian insentif penanaman modal bagi investor di Provinsi Sumatera Barat.

6. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat

Anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 74.121.976,00 atau 92,65%, realisasi fisik dapat dicapai 100%. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan data dan informasi tentang penanaman modal yang *up to date* serta informatif, Buku Data Perkembangan Modal Sumatera Barat tahun 2015 sebagai dasar untuk perencanaan, pengembangan, pengendalian dan penyusun kebijakan daerah mengenai penanaman modal.

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat tahun 2016 dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data penanaman modal PMA dan PMDN dari BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dan data PMDN Non Fasilitas berdasarkan izin-izin yang dikeluarkan oleh PDKPM yang ada di seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat serta cross check data yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI secara periodik.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah buku Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Tahun 2015/2016 sebanyak 100 (seratus) buku, dapat dicapai sesuai target. Hasil dari kegiatan ini adalah dapat dimanfaatkannya data perkembangan realisasi investasi fasilitas dan non fasilitas di Sumatera Barat bagi pengambil kebijakan dan dunia usaha sebanyak 19 kab/kota.

7. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran sebesar Rp. 108.007.700,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 92.179.100 atau sebesar 85,34%, realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target.

8. Penyelenggaraan Promosi Investasi

Anggaran sebesar Rp. 433.594.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 431.247.404 atau sebesar 99,46%, untuk realisasi fisik tercapai 100%. Maksud dan tujuan diadakan Promosi Investasi adalah agar potensi dan peluang investasi Sumatera Barat dapat dikenal oleh kalangan dunia usaha (investor) sehingga menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi, untuk menarik minat dari calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat, dan membangun citra positif yang dapat menimbulkan kepercayaan investor terhadap Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi yang menguntungkan. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi promosi investasi ke dalam dan luar negeri dengan melaksanakan misi investasi dan mengikuti beberapa event.

9. Gelar Potensi dan Temu Usaha

Anggaran sebesar Rp. 140.796.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 139.620.000 atau sebesar 99,16%. Untuk realisasi fisik tercapai 100%, sesuai dengan target.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:

- Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam rangka promosi sektor unggulan sebagai peluang investasi dalam suatu pertemuan dengan para calon investor.
- Menarik minat calon investor untuk melakukan kegiatan investasi di Sumatera Barat.

Penyelenggara dari kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha adalah merupakan kegiatan pertemuan koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi bersama Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi peluang investasi dengan para pengusaha perantau Minang, Asosiasi yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi, calon investor baik nasional maupun internasional.

Keluaran dari kegiatan ini dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan GPTU yang dihadiri oleh 60 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat sebanyak 5 calon investor (sesuai target).

10. Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UMKMK

Anggaran sebesar Rp. 66.700.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 64.679.450 atau sebesar 96,97%, untuk realisasi fisik tercapai 100%. Maksud dan tujuan kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UMKMK adalah untuk memfasilitasi terjadinya pertemuan antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKMK sehingga terjadinya suatu transfer *knowledge* dan berbagi informasi antara kedua belah pihak dengan tujuan diharapkan terbentuknya kesepakatan dalam suatu kerjasama strategis yang saling menguntungkan dan berkesinambungan dalam pelaksanaannya untuk masa mendatang.

11. Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Dunia Usaha

Anggaran sebesar Rp. 39.006.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 32.709.500 atau sebesar 83,86%. Untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%.

12. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal

Anggaran sebesar Rp. 62.300.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 58.965.950,00 atau sebesar 94,65%, untuk realisasi fisik tercapai 100%.

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dalam membantu mendorong pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi spasial penanaman modal. Keingatannya lebih diarahkan pada pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam, penataan

data dan informasi yang meliputi potensi dan peluang investasi, pembangunan dan pengembangan basis data spasial serta terwujudnya jaringan sistem informasi perlu terus dikembangkan dan di update untuk mendukung perencanaan spasial pada tingkat regional/Provinsi yang terdiri dari peta kesesuaian lahan, status hutan, dan peta investasi existing. Hal ini dimaksud agar tersedianya data dasar utama secara lengkap dan benar serta berfungsi sebagai bank data dan jaringan data spasial sebagai faktor utama operasionalisasi. Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh hasil tersedianya Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal Sumatera Barat sebanyak 1 (satu) unit dapat tercapai sesuai target (100%).

13. Pembuatan Bahan/Materi Promosi Investasi

Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 93.693.800,00 atau sebesar 93,69%, untuk realisasi fisik tercapai 100%.

Adapun hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya bahan presentasi tentang peluang investasi yang ada di Sumatera Barat yang akan ditawarkan kepada calon investor serta materi promosi sebanyak 4 (empat) macam materi promosi investasi (sesuai target).

14. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat

Anggaran sebesar Rp. 146.940.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 140.763.800,00 atau sebesar 95,80%, untuk realisasi fisik tercapai 100%.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah membuat direktori potensi daerah (Kabupaten/Kota) yang ada di Sumatera Barat untuk memberikan informasi kepada calon investor sektor untuk bidang usaha mereka berinvestasi di Sumatera Barat.

Keluaran ini akan menghasilkan kemudahan bagi investor/calon investor dalam memperoleh data dan informasi potensi dan peluang investasi bagi 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

15. Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi Sektor Industri

Anggaran sebesar Rp. 209.062.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 181.852.050,00 atau sebesar 86,98%, untuk realisasi fisik tercapai 100%.

16. Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan Investasi

Anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 34.074.291,00 atau sebesar 85,19%, untuk realisasi fisiknya tercapai 100%. Realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya Narasumber dari Polda yang tidak bisa hadir serta sisa dari penggantian transportasi dan akomodasi Narasumber.

17. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi

Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 43.842.077,00 atau sebesar 87,68%, untuk realisasi fisik tercapai 100%, sedangkan capaian kinerja melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

18. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran sebesar Rp. 86.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 82.698.900,00 atau sebesar 96,16%, untuk realisasi fisik capaiannya adalah sebesar 100%.

Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini dimaksudkan untuk melakukan dan mengikuti pertemuan koordinasi kelembagaan investasi daerah dalam lingkup Provinsi dan nasional untuk bertukar informasi serta mencari solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan kegiatan investasi daerah.

Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi program/kegiatan penanaman modal pusat dan daerah serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam kegiatan investasi dilihat dari aspek perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal. Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh rumusan rekomendasi terkait permasalahan/kendala dibidang perencanaan dan kebijakan, promosi, pengendalian dan pembinaan penanaman modal serta pelayanan perizinan tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hasil kegiatan ini adalah terciptanya harmonisasi perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional (sesuai target).

19. Konsolidasi Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota

Anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.937.100,00 atau sebesar 26,46%, untuk realisasi fisik tercapai 100%. Penyerapan anggaran dibawah 90%.

F. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

Anggaran sebesar Rp. 670.060.000,00 dan realisasi Rp. 588.234.042,00. Pelaksanaan 3 kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 87,79%, sementara target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

I. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Anggaran Rp. 520.060.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 478.293.150,00 atau sebesar 91,97%, untuk realisasi fisik dapat tercapai 100%, dan secara kinerja dapat tercapai melebihi target yakni sebesar 1.027 izin/non izin (target: 600 izin/non izin).

Maksud dari kegiatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan dari kegiatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk membantu penanam modal atau investor/dunia usaha dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi mengenai penanaman modal.

Keluaran Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) keluaran yaitu:

- a. Dalam rangka penyelenggaraan PTSP tahun 2016 telah diterbitkan perizinan/non perizinan sebanyak 1.027 izin/rekomendasi dapat melebihi target (target: 600 izin/rekomendasi).
- b. Telah dilaksanakan survey kepuasan masyarakat selama 12 bulan.
- c. Telah tersusunnya laporan data penanganan pengaduan masyarakat tahun 2016.
- d. Telah adanya perpanjangan sertifikasi ISO.

Hasil dari kegiatan yaitu persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu dapat tercapai sesuai yang ditargetkan yakni sebesar 100%, yaitu sebanyak 35 izin dengan lamanya waktu proses sesuai SOP yaitu 7 hari.

2. Forum PTSP

Anggaran Rp. 50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 17.026.000,00 atau sebesar 34,05%, untuk realisasi fisik tercapai 100%. Penyerapan anggaran dibawah 90%.

3. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 92.914.892,00 atau sebesar 92,91%, untuk realisasi fisik tercapai 100%. Maksud dan tujuan kegiatan adalah meningkatkan kemampuan teknis, pengetahuan dan wawasan aparatur penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik.

Keluaran dari kegiatan ini adalah:

- ✓ Studi teknis terkait peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 5 (lima) orang dengan target 6 (enam) orang, yaitu Sharing Informasi Penyelenggaraan PTSP Secara Umum untuk 2 (dua) orang di BPM Jawa Timur dan Sharing Informasi Penerapan Aplikasi Sistem Online untuk 3 (tiga) orang di BPMPT Jawa Timur.

- ✓ Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan terkait PTSP sebanyak 6 (enam) aparatur dengan target 7 (tujuh) aparatur, yaitu Diklat Penanaman Modal Tingkat Pertama untuk 4 (empat) orang di Cipanas (Jawa Barat) dan Magang SPIPISE untuk 2 (dua) orang di BKPM RI (Jakarta).

Hasil dari kegiatan ini adalah adanya pemahaman aparatur terkait penyelenggaraan PTSP terhadap 6 (enam) orang aparatur, target 7 (tujuh) orang aparatur. Target ini tidak bisa tercapai dikarenakan kurangnya anggaran untuk pelaksanaan I kali pelatihan lagi. Hal ini disebabkan oleh lamanya waktu pelaksanaan pelatihan (pelaksanaan pelatihan sekitar 6 hari, sedangkan hari pelatihan yang dianggarkan untuk 3 hari).

4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada anggaran tahun 2016 ini boleh dikatakan hampir tidak ada hambatan dan kendala, dari target yang telah ditetapkan hanya 8.40 % keuangan yang tidak terealisasi. Pada umumnya hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya tetapi sasaran dari kegiatan tersebut tercapai. Antara lain kegiatan-kegiatan yang realisasinya dibawah 90% :

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran Rp. 213.681.500,00 dan realisasi Rp. 180.284.714,00 atau sebesar 84,37%. Kegiatan ini dimaksudkan agar sarana komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet kantor dapat digunakan untuk mendukung aktifitas kantor. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi telepon, listrik dan internet kantor selama tahun 2016.

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran Rp. 62.800.000,00 dan realisasi Rp. 52.583.000,00 atau sebesar 83,73%. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama tahun anggaran 2016 terdiri dari 5 (lima) unit AC dan 3 (tiga) unit tabung racun api dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan target yang ditetapkan.

c) Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Anggaran Rp. 124.250.000,00 dan realisasi Rp. 17.575.000,00 atau sebesar 14,14%. Kegiatan ini terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan dengan telah dilaksanakan pengadaan/pembelian I (satu) unit komputer PC, dan 2 (dua) unit printer. Realisasi kegiatan ini sangat rendah karena rasionalisasi anggaran.

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran Rp. 28.500.000,00 dan realisasi Rp. 24.937.200,00 atau sebesar 87,50%. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain adalah pemeliharaan dan perbaikan AC, komputer, printer, mesin tik, infokus, dan CCTV sesuai dengan target yang ditetapkan.

e) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Anggaran Rp. 62.308.752,00 dan realisasi Rp. 49.263.350,00 atau sebesar 79,06%. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD menyediakan dana untuk proses penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD dengan output tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, dan DPPA SKPD selama I (satu) tahun. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi pembuatan Renstra, Renja, RKA, DPA, dan DPPA SKPD.

f) Penatausahaan Keuangan SKPD

Anggaran Rp. 171.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 154.050.000,00 atau 89,93%. Telah terlaksananya penatausahaan keuangan untuk tahun 2016. Kegiatan ini merupakan penyediaan honor pengelola keuangan daerah, honor pengelola SIPKD dan honor pengelola SIMGAJI PNSD dan telah dibayar honor dimaksud sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Tahun 2016.

g) Penyelesaian Permasalahan Investasi

Anggaran sebesar Rp. 79.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 61.146.400,00 atau sebesar 77,40 %. Untuk realisasi fisik capaiannya adalah sebesar 100%, bahkan secara kinerja keluaran dapat tercapai melebihi target. Rendahnya penyerapan anggaran di bawah 90% disebabkan karena perjalanan dinas ke Kab.Kep.Mentawai yang tidak dilaksanakan dikarenakan belum adanya permasalahan yang akan diproses dan difasilitasi serta sisa anggaran seperti tiket pesawat.

Maksud dari kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi yaitu implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat, dan BKPM&PPT Prov. Sumbar beserta Badan/Kantor Penanaman modal atau yang menangani fungsi Penanaman Modal di Kab/Kota merupakan lembaga yang mengkoordinir kegiatan investasi PMA/PMDN yang menjadi kewenangan masing-masing yang diharapkan dapat membantu para penanam modal agar dapat merealisasikan proyeknya dengan lancar dan aman tanpa ada hambatan yang berarti.

Tujuan kegiatan adalah agar permasalahan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran investasi PMDN/PMA di Kabupaten/Kota khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya dapat di fasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir melalui suatu

Tim koordinasi penanaman modal yang melibatkan instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Keluaran atau output dari kegiatan ini:

1. Jumlah Perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat yang difasilitasi permasalahannya sebanyak 4 perusahaan PMA/PMDN sedangkan yang bisa difasilitasi adalah 9 perusahaan (melebihi target), yaitu PT. Padang Sumatera Sawindo, CV. Batu Tongga, PT. Andalas Mining Resources, CV. Ziqri Bersaudara, CV. Talago Dibawah Gunung, PT. Limaco Energie, PT. Atoz Nusantara Mining, CV. Indo Jaya Perkasa, dan PT. Multikarya Sawit Prima.
2. Pembahasan proses penyelesaian permasalahan perusahaan sebanyak 4 kali (sesuai target). Hasil (Outcome) kegiatan adalah tercapainya solusi pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat sebanyak 8 perusahaan PMA/PMDN, dapat terealisasi melebihi target (3 perusahaan PMA/PMDN). Kedelapan perusahaan tersebut adalah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu perusahaan yang difasilitasi permasalahannya, kecuali PT. Multikarya Sawit Prima, ini terkait batas wilayah Kab. Solok Selatan dengan Kab. Dharmasraya.

h) Forum Investasi Sumatera Barat

Anggaran sebesar Rp. 33.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 12.058.500,00 atau 36,54 %. Realisasi fisik hanya tercapai 65% disebabkan pelaksanaan forum investasi yang direncanakan 2 kali pertemuan hanya terlaksana 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak bisanya narasumber pusat untuk dapat menghadiri pertemuan dan memberikan materi tentang permasalahan investasi khususnya tentang Permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disampaikan oleh BKPRN Pusat, sehingga antara tata ruang dan investasi bisa bersinergi dan tidak menjadi salah satu penghambat untuk investasi di Sumatera Barat.

Maksud dari kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat yaitu sebagai wujud tanggung jawab BKPM&PPT Prov. Sumbar dan SKPD lintas Sektor dan Badan/Kantor Penanaman Modal atau yang membidangi fungsi penanaman Modal di Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Badan/Kantor Penanaman Modal atau yang menangani fungsi Penanaman Modal di Kab/Kota. Kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat bertujuan untuk mengakomodir segala permasalahan yang dihadapi oleh Badan/Kantor Penanaman Modal atau yang menangani fungsi penanaman modal di kabupaten/kota dalam menghadapi permasalahan perusahaan dan sebagainya untuk dicarikan solusi pemecahannya.

Pertemuan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Gubernur pada tanggal 26 September 2016. Peserta pertemuan Forum Investasi Sumatera Barat adalah SKPD lintas sektor dan Badan/Kantor penanaman modal atau yang menangani fungsi penanaman modal di Kabupaten/Kota.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat ini adalah:

1. Terlaksananya forum Investasi dalam rangka memonitor dan mengatasi permasalahan investasi di Sumatera Barat untuk 100 orang peserta lintas SKPD dan pihak terkait sebanyak 2 kali pertemuan, sedangkan yang dapat terlaksana adalah 1 kali pertemuan dengan peserta 50 orang.
2. Adanya rumusan terhadap permasalahan/kendala investasi sebanyak 2 rumusan, sedangkan yang terlaksana baru 1 rumusan dikarenakan pertemuan forum investasi yang dilaksanakan hanya 1 kali pertemuan.

Sedangkan hasil yang diperoleh dari Forum Investasi ini adalah adanya 1 solusi terhadap permasalahan investasi di Sumatera Barat yang dirumuskan pada pertemuan Forum ini (target 2 solusi).

i) **Penyusunan Insentif Penanaman Modal**

Anggaran sebesar Rp. 15.100.000,00 terealisasi sebesar Rp. 13.458.050,00 atau 89,13%. Untuk realisasi fisiknya tercapai 100%. Kegiatan Penyusunan Insentif Penanaman Modal ini dimaksudkan agar pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Untuk menyusun kebijakan/aturan terkait pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
- b. Untuk menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat.

Adapun keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dapat tercapai sesuai target dan sudah disampaikan ke Biro Hukum melalui surat kepala BKPM&PPT Provinsi Sumatera Baraat nomor: 570/671/Perenc-2016 pada tanggal 28 Desember 2016. Hasil kegiatan adalah adanya pemberian insentif penanaman modal bagi investor di Provinsi Sumatera Barat.

j) **Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Anggaran sebesar Rp. 108.007.700,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 92.179.100 atau sebesar 85,34%, realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target. Penyerapan anggaran dibawah 90% karena disebabkan karena kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pada BKPM&PPT

Prov.Sumbar yang ditunda pelaksanaannya dengan jumlah penundaan anggaran Rp.7.420.000,-, sehingga sisa anggaran yang dapat dibelanjakan adalah sebesar Rp.100.587.700,-, artinya realisasi keuangan kegiatan ini sebenarnya telah tercapai 88,17%, selebihnya merupakan efisiensi belanja perjalanan dinas luar daerah (sisa tiket pesawat) dan sisa BBM.

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal serta melakukan kegiatan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proyek perusahaan PMA/PMDN untuk penerbitan izin usaha dilakukan terhadap perusahaan yang sudah berproduksi komersil dan telah merealisasikan investasinya minimal 75% dari rencana dan untuk proses pencabutan Surat Persetujuan/pembatalan dilakukan bagi perusahaan yang tidak pernah merealisasikan investasinya sama sekali dan tidak lagi berproduksi atau macet serta tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Dengan demikian maksud dan tujuan dilaksanakan Pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN adalah agar penyimpangan yang dilakukan para penanam modal dapat diminimalisir sesuai ketentuan yang berlaku dan BKPM&PPT Provinsi tidak lagi mencatat data perusahaan yang tidak produktif sehingga data yang ada akan lebih baik serta diharapkan target realisasi investasi yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Keluaran dari kegiatan ini adalah:

1. Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN sebanyak 12 perusahaan (tercapai sesuai target), yaitu:
 - 5 perusahaan sudah produksi
 - 6 perusahaan masih dalam masa konstruksi
 - 1 perusahaan tidak ada aktifitas dilapangan (tidak merealisasikan investasinya) atau macet
2. Pembuatan BAP Penerbitan dan Pencabutan Izin Prinsip/SP terhadap 10 perusahaan (sesuai target 10 perusahaan), yaitu:
 - 3 Perusahaan untuk izin usaha tetap
 - 7 Perusahaan BAP pencabutan

Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah:

- Adanya penyampaian LKPM oleh perusahaan PMA/PMDN dan pelaksanaan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 12 perusahaan (dapat mencapai target 12 perusahaan).

- Adanya kemudahan bagi investor dalam pengurusan Izin Usaha Tetap (IUT) dan terlaksananya pencabutan Surat Persetujuan (SP) bagi perusahaan yang macet sebanyak 10 perusahaan dapat tercapai sesuai target.

k) Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Dunia Usaha

Anggaran sebesar Rp. 39.006.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 32.709.500 atau sebesar 83,86%. Untuk realisasi fisik tercapai sebesar 100%. Penyerapan anggaran dibawah 90% disebabkan karena efisiensi biaya perjalanan dinas dari sisa tiket dan efisiensi belanja BBM.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mempersiapkan Sumatera Barat sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan memasarkannya kepada dunia luar secara strategis, sistematis dan efisien.
2. Menarik investor khususnya investor asing, untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Sumatera Barat.
3. Melakukan penyusunan rekomendasi yang berisikan langkah-langkah bagi percepatan peningkatan realisasi investasi di Sumatera Barat.

Kegiatan peningkatan kerjasama investasi dengan lembaga terkait dan dunia usaha dilaksanakan di Kota Padang dalam rangka pertemuan dengan stakeholder terkait dan di Jakarta serta Bandung untuk berkoordinasi dengan pihak Kementrian teknis terkait serta ke Kab./Kota di Sumatera Barat untuk koordinasi teknis, dengan waktu pelaksanaan bulan Januari sampai Desember 2016.

Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh keluaran telah terfasilitasinya kerjasama investasi pada 2 sektor, yaitu sektor panas bumi dan sektor pariwisata (sesuai target), dan telah dilaksanakan pertemuan dengan Kab./Kota bidang penanaman modal, bidang pariwisata, dan bidang ESDM sebanyak 2 (dua) kali pertemuan.

Hasil yang diperoleh adalah didapatkan rekomendasi untuk tindak lanjut 2 buah, yakni sektor panas bumi dan sektor pariwisata.

1. Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi Sektor Industri

Anggaran sebesar Rp. 209.062.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 181.852.050,00 atau sebesar 86,98%, untuk realisasi fisik tercapai 100%.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif yang tepat dalam berinvestasi dimana dilakukan identifikasi kelayakan teknis, pasar, dan finansial agar dapat memberikan informasi mengenai kelayakan teknis pasar, dan finansial di Provinsi Sumatera Barat bagi investor. Sedangkan

tujuan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan penghasilan nelayan kecil dengan cara pengadaan dan perbaikan kapal dengan alih teknologi dari yang berbahan kayu ke Fiber.

Kegiatan ini dilaksanakan Konsultan PT. Poly Arsitektur melalui LPSE dan ditunjuk oleh ULP sesuai Surat Perjanjian Nomor 03/SP-Kapal/BKPM&PPT-2016 tanggal 25 Mei 2016. Tenaga ahli yang dilibatkan dalam kegiatan ini sebanyak 8 orang yang terdiri dari Ketua Tim/Ahli Ekonomi Pembangunan, Ahli Ekonomi Industri, Ahli Ekonomi, Ahli Perkapalan, Ahli Perikanan, Ahli Teknik Sipil, Ahli Sosiologi Antropologi.

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- I (satu) dokumen FS proyek investasi sektor industri pakan ikan yang dicetak sebanyak 100 buku (sesuai target) dalam 2 bahasa.
- Leaflet dalam 2 bahasa
- Jumlah peserta yang mengikuti *Workshop* sebanyak 50 peserta (target 50 peserta), tidak terlaksana dengan alasan sudah terwakili kegiatan FGD yang langsung dilaksanakan dikelompok masyarakat nelayan yang memang membutuhkan pabrik dan perawatan kapal dengan biaya murah bila dihitung ongkos produksi yang dikeluarkan mereka selama ini.

Hasil dari kegiatan ini adalah memudahkan investor/calon investor memperoleh FS investasi industri perkapalan skala kecil dan menengah dengan yang LAYAK dari aspek sumber daya, aspek potensi dasar, aspek teknis, aspek finansial, dan aspek lingkungan. Sedangkan daerah yang direkomendasikan cocok di PPI Muaro Penyalinan.

m. Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan Investasi

Anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 34.074.291,00 atau sebesar 85,19%, untuk realisasi fisiknya tercapai 100%. Realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya Narasumber dari Polda yang tidak bisa hadir serta sisa dari penggantian transportasi dan akomodasi Narasumber.

Maksud dari kegiatan ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan peserta mengenai penyelesaian permasalahan investasi di Sumatera Barat, dengan adanya pertemuan ini diharapkan kepada seluruh Badan/kantor penanaman modal atau yang menangani fungsi penanaman modal di Kabupaten/Kota dapat membentuk Satuan Tugas Penanaman modal yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan investasi dan untuk lebih meningkatnya koordinasi/sinkronisasi antara BKPM RI, BKPM&PPT Prov.Sumbar dengan Badan/Kantor Penanaman Modal atau yang menangani fungsi penanaman modal di Kab/Kota sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta untuk

menyelesaikan permasalahan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran investasi PMDN/PMA di Sumatera Barat dapat difasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir melalui suatu Tim Satuan tugas penanaman modal yang melibatkan Instansi/lembaga teknis Terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Untuk menciptakan pemahaman bahwa betapa pentingnya Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan investasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat.
- b. Meningkatkan koordinasi antara BKPM, BKPM&PPT Prov.Sumbar serta Badan/kantor penanaman modal atau yang membidangi urusan penanaman modal di kabupaten Kota.

n. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi

Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 43.842.077,00 atau sebesar 87,68%, untuk realisasi fisik tercapai 100%, sedangkan capaian kinerja melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu dari target 7 kabupaten/kota yang dilakukan koordinasi tercapai sebanyak 12 kabupaten/kota dan dari target 6 jumlah calon investor yang difasilitasi tercapai sebanyak 10 calon investor.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Mengkoordinasikan rencana promosi dan hasil promosi Sumatera Barat secara terintegrasi baik yang dilakukan oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- Memfasilitasi para pengusaha/calon investor/dunia usaha yang berminat terhadap potensi daerah Sumatera Barat ke daerah tempat tujuan rencana investasi.
- Memfasilitasi misi investasi dari luar ke Sumatera Barat dalam bentuk koordinasi, pendampingan maupun pertemuan sesuai kebutuhan.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya promosi dengan kabupaten/kota sebanyak 9 kabupaten/kota dapat melebihi target (target 7 kabupaten/kota).
- Jumlah calon investor yang difasilitasi sebanyak 10 calon Investor dapat melebihi target (target 6 calon investor)

Hasil dari kegiatan ini adalah: meningkatnya koordinasi promosi & kerjasama dengan kabupaten/kota sebanyak 9 kabupaten/kota (melebihi target 7 kabupaten/kota). Meningkatnya minat calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat dengan cara menghubungi pihak BKPM&PPT menanyakan tentang peluang investasi yang mereka minati melalui media elektronik.

o. Konsolidasi Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota

Anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.937.100,00 atau sebesar 26,46%, untuk realisasi fisik tercapai 100%. Penyerapan anggaran dibawah 90% disebabkan karena kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pada BKPM&PPT Prov.Sumbar yang ditunda pelaksanaannya dengan jumlah penundaan anggaran Rp. 22.062.900,00 sehingga sisa anggaran yang dapat dibelanjakan adalah sebesar Rp. 7.937.100,00 artinya realisasi keuangan kegiatan ini sebenarnya telah tercapai 100%.

Maksud adanya kegiatan Konsolidasi Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota adalah untuk menyamakan/mensinkronkan data realisasi investasi Kabupaten/Kota dengan realisasi investasi Provinsi berdasarkan LKPM yang disampaikan perusahaan setiap Triwulan ataupun setiap Semester.

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada Kabupaten/Kota tentang pentingnya LKPM yang disampaikan oleh Perusahaan PMA/PMDN, untuk menghitung ralisasi investasi.
2. Kabupaten/Kota agar menerbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal dengan menggunakan SPIPISE sebagai Izin Awal dari perizinan lainnya.
3. Dalam rangka pencapaian target realisasi investasi diharapkan peran serta Kabupaten/Kota.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terdatanya data realisasi investasi PMA/PMDN di Sumatera Barat melalui I kali pertemuan dengan peserta 40 orang (sesuai target), sedangkan I kali pertemuan lagi ditunda pelaksanaannya.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data realisasi investasi PMA/PMDN di 19 kab./kota di Sumatera Barat serta:

- Sinkronnya/samanya data realisasi investasi Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat.
- Terciptanya kesamaan persepsi antara aparat pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat.

p. Forum PTSP

Anggaran Rp. 50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 17.026.000,00 atau sebesar 34,05%, untuk realisasi fisik tercapai 100%. Penyerapan anggaran dibawah 90% disebabkan karena Forum PTSP merupakan salah satu kegiatan pada BKPM&PPT Prov.Sumbar yang ditunda pelaksanaannya dengan jumlah penundaan anggaran Rp. 26.654.500,00 sehingga sisa anggaran yang dapat dibelanjakan adalah sebesar Rp. 23.345.500,00 artinya realisasi keuangan kegiatan ini sebenarnya telah tercapai 72,82%.

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan Forum PTSP ini dilaksanakan adalah untuk mensinkronisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten/Kota dengan PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan tahapan-tahapan:

1. Melakukan penyederhanaan perizinan, baik dari segi jumlah, persyaratan, waktu, maupun prosedur di lembaga PTSP.
2. Berbagi informasi dan berusaha mengembangkan inovasi penyelenggaraan PTSP untuk meningkatkan pelayanan prima dengan membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi dalam mendorong perekonomian daerah.
3. Melakukan reformasi birokrasi dan regulasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang masih menghambat proses penerbitan perizinan dan non perizinan dengan prinsip cepat, mudah, murah, sederhana, transparan, akuntabel dan tidak diskriminasi serta terhindar dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (sesuai target).
- Pelaksanaan forum PTSP untuk 120 orang sebanyak 2 kali (1 kali sesuai target dengan jumlah peserta 60 orang dan 1 kali ditunda pelaksanaannya).

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya penguatan kelembagaan dan pembinaan PTSP di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2015, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap serta Pergub No. 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub No 43 tahun 2014 tanggal 29 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Pengukuran/Penilaian Aset

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

a. Investasi dalam bentuk surat berharga :

- 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan..
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar

e. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

f. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

g. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

h. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

i. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATL) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan

3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (*at cost*), dan untuk pertama kali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

BAB V

Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1.	Retribusi Daerah	617.000.000	733.605.720	118,90	768.982.800

1. Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 118,90% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2015, maka terdapat penurunan sebesar Rp 35.377.080 hal ini disebabkan karena pendapatan retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing mengalami penurunan sebesar Rp. 58.443.800,00 atau sebesar 8,34% dibandingkan tahun 2015. Penurunan ini disebabkan karena adanya tenaga kerja asing yang tidak memperpanjang izinnya di tahun 2016 dan tidak adanya perpanjangan kontrak perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Namun, jika dilihat dari target realisasi pendapatan retribusi dari pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi dan pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sudah melebihi target yang ditetapkan yakni dengan 118,90%.

Pendapatan ini terdiri dari: (rincian objek pendapatan)

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1.	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	12.000.000	32.793.720	273,28	9.727.000
2.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	605.000.000	700.812.000	115,84	759.255.800

Penerimaan pendapatan retribusi daerah pada BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan.



5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
a.	Belanja pegawai	4.308.747.705	4.197.541.104	97,42	4.035.250.675

a. Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 97,42% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp 162.290.429 disebabkan karena kenaikan belanja gaji dan tunjangan. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.144.161.727	3.127.282.537	99,46	2.834.299.124
1.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.534.820.300	2.527.396.800	99,71	2.192.787.200
2.	Tunjangan Keluarga	210.311.110	208.281.182	99,03	198.370.634
3.	Tunjangan Jabatan	171.260.000	164.960.000	96,32	201.910.000
4.	Tunjangan Fungsional Umum	89.905.000	89.175.000	99,19	75.350.000
5.	Tunjangan Beras	122.347.072	122.027.700	99,74	120.486.580
6.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.482.835	15.409.521	99,53	45.356.175
7.	Pembulatan Gaji	35.410	32.334	91,31	38.535
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.146.075.978	1.053.434.008	91,92	1.186.303.426
8.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.069.275.978	1.053.434.008	98,52	1.087.503.426
9.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	76.800.000	-	-	98.800.000
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	18.510.000	16.824.559	90,89	14.648.125
10.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Perikanan	360.000	360.000	100,00	285.000
11.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	18.150.000	16.464.559	90,71	14.363.125



LAPORAN KEUANGAN 2016 BASIS AKRUAL

Saldo/jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2016 sejumlah Rp. 3.780.000 yang terdiri dari: belanja tunjangan jabatan struktural Rp. 3.780.000 atas nama Guspri Yeni.

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
b.	Belanja Barang & Jasa	3.845.714.500	3.522.765.940	91,60	3.783.397.416

b. Belanja Barang & Jasa

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 91,60% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat penurunan sebesar Rp 260.631.476 disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran. Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari:

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
	Belanja Bahan Pakai Habis	331.826.077	286.252.945	86,27	331.155.964
1.	Belanja alat tulis kantor	99.416.700	92.430.600	92,97	79.400.600
2.	Belanja alat listrik dan elektronik	7.500.000	7.498.000	99,97	6.498.000
3.	Belanja perangko, materai, dan	9.445.000	9.410.000	99,63	9.435.000
4.	benda pos lainnya				
5.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.616.825	11.123.000	95,75	12.399.500
6.	Belanja BBM/Gas	116.412.252	88.858.345	76,33	125.486.914
7.	Belanja Seminar Kit Peserta	20.125.000	14.125.000	70,19	20.660.000
8.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	67.310.300	62.808.000	93,31	77.275.950
	Belanja Jasa Kantor	341.351.500	282.320.548	82,71	289.075.546
9.	Belanja telepon	12.000.000	11.675.275	97,29	8.418.972
10.	Belanja listrik	164.872.500	133.809.439	81,16	82.838.481
11.	Belanja surat kabar/majalah	13.200.000	12.000.000	90,91	13.180.000
12.	Belanja kawat/faksimili/internet/VPN	36.809.000	34.800.000	94,54	45.882.493
13.	Belanja jasa publikasi	200.000	0	0,00	22.898.400
14.	Belanja jasa akomodasi	21.900.000	17.999.300	82,19	62.250.000
15.	Belanja transportasi	62.370.000	41.901.991	67,18	53.607.200
16.	Belanja jasa dekorasi	30.000.000	29.834.543	99,45	0
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.000.000	63.050.284	90,07	63.670.700
17.	Belanja jasa service	18.700.000	16.306.269	87,20	16.088.000
18.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.700.000	30.418.795	99,08	22.684.300
19.	Belanja BBM/Gas dan Pelumas	14.050.000	11.617.120	82,68	19.098.900
20.	Belanja Pajak Kendaraan	6.550.000	4.708.100	71,88	5.799.500



	Bermotor				
	Belanja Cetak dan Pengandaan	145.551.000	131.210.750	90,15	128.140.750
21.	Belanja Cetak	83.167.500	79.177.500	95,20	78.625.000
22.	Belanja Pengandaan	62.383.500	52.033.250	83,41	49.515.750
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	87.400.000	84.600.000	96,80	77.100.000
23.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	80.000.000	80.000.000	100,00	69.000.000
24.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.400.000	4.600.000	62,16	8.100.000
	Belanja Makanan dan Minuman	170.027.000	138.420.000	81,41	202.856.950
25.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.144.500	53.585.000	78,63	81.722.500
26.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	84.842.500	67.795.000	79,91	109.214.450
27.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pengaman	17.040.000	17.040.000	100,00	11.920.000
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	31.320.000	31.320.000	100,00	26.460.000
28.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	31.320.000	31.320.000	100,00	26.460.000
	Belanja Pakaian Kerja	5.669.158	5.669.000	100,00	3.050.000
29.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.669.158	5.669.000	100,00	3.050.000
	Belanja Perjalanan Dinas	1.901.125.000	1.804.716.780	94,93	1.505.095.706
30.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	988.450.000	918.900.000	92,96	752.194.300
31.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	837.675.000	810.926.780	96,81	752.901.406
32.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	75.000.000	74.890.000	99,85	0
	Belanja Pemeliharaan	84.500.000	80.787.200	95,61	63.315.000
33.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.500.000	30.787.200	89,24	13.525.000
34.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000	50.000.000	100,00	49.790.000
	Belanja Jasa Konsultansi	199.062.000	187.395.800	94,14	116.493.000
35.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	139.062.000	128.062.000	92,09	0
36.	Belanja Jasa Konsultansi survellen/assesmen	20.000.000	20.000.000	100,00	0
37.	Belanja Jasa Konsultansi Design	40.000.000	39.333.800	98,33	71.993.000
38.	Belanja Jasa Konsultansi Pendampingan				44.500.000
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek PNS	4.275.000	3.675.000	85,96	7.250.000
39.	Belanja Sosialisasi	2.475.000	1.875.000	75,76	5.850.000
40.	Belanja Bimbingan Teknis	1.800.000	1.800.000	100,00	1.400.000
	Belanja Jasa Lembaga				459.759.800
41.	Belanja Jasa Lembaga				39.500.000



42.	Sertifikasi Belanja Jasa Lembaga Pendidikan				420.259.800
	Honorarium PNS	228.550.000	199.600.000	87,33	211.875.000
43.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.050.000	1.450.000	70,73	4.150.000
44.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.500.000	14.600.000	56,81	26.800.000
45.	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	135.300.000	118.050.000	87,25	129.925.000
46.	Honorarium Pengelola Asset Daerah	17.400.000	17.400.000	100,00	17.400.000
47.	Honorarium Pengelola SIPKD	30.000.000	30.000.000	100,00	24.000.000
48.	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	9.600.000	9.600.000	100,00	3.600.000
49.	Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000
50.	Honorarium Pengelola SIMBANGDA	2.500.000	2.500.000	100,00	0
	Honorarium Non PNS	232.057.765	210.747.633	90,82	286.049.0002
51.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	63.100.000	49.150.000	77,89	78.600.000
52.	Belanja Jasa Moderator	13.000.000	8.500.000	65,38	10.200.000
53.	Belanja Jasa Penerjemah	9.000.000	9.000.000	100,00	0
54.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	5.150.000	3.800.000	73,79	1.750.000
55.	Belanja Pembaca Doa/Al- Quran	1.400.000	1.000.000	71,43	1.500.000
56.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor	61.574.590	61.264.458	99,50	45.500.000
57.	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	74.483.175	74.483.175	100,00	68.250.000
59.	Belanja Jasa Peliputan	600.000	600.000	100,00	31.000.000
60.	Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan	3.750.000	3.250.000	86,67	3.150.000
61.	Belanja Jasa Laundry				1.599.000
62.	Belanja Jasa Dekorator				44.500.000
	Belanja Kontribusi	4.000.000	4.000.000	100,00	5.750.000
63.	Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang	4.000.000	4.000.000	100,00	5.750.000
	Belanja Vakasi/Verifikasi	9.000.000	9.000.000	100,00	6.300.000
64.	Belanja Verifikasi	9.000.000	9.000.000	100,00	6.300.000

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 322.948.560 adalah :

Belanja Barang & Jasa **322.948.560**

1.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.573.132
2.	Belanja Jasa Kantor	59.030.952
3.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.949.716
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.340.250
5.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000



6.	Belanja Makanan dan Minuman	31.607.000
7.	Belanja Perjalanan Dinas	96.408.220
8.	Belanja Pemeliharaan	3.712.800
9.	Belanja Jasa Konsultansi	11.666.200
10.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek PNS	600.000
11.	Honorarium PNS	28.950.000
12.	Honorarium Non PNS	21.310.132

Saldo/jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2016 sejumlah Rp. 5.949.865 yang terdiri dari: pengembalian belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 5.949.865.

Dari realisasi belanja barang ini, sejumlah Rp 39.333.800 dikapitalisir menjadi Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut : (lampiran 23)

Ke Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud) 39.333.800,00

- Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal	39.333.800,00
--	---------------

Dikapitalisirnya belanja barang tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 .

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
	Belanja Modal	684.026.500	564.316.500	82,50	416.035.219

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2016 dan 2015 . Realisasi tahun 2016 mencapai 82,50% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar Rp 148.281.281 disebabkan karena adanya belanja modal alat angkutan darat bermotor dan pengadaan alat komunikasi . Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Uraian belanja modal tersebut adalah sebagai berikut:

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
	BM. Peralatan dan Mesin	684.026.500	564.316.500	82,50	72.321.819



a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 82,50% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar Rp 491.994.681 disebabkan karena adanya pengadaan alat angkutan darat bermotor dan pengadaan alat komunikasi.

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
	BM. Peralatan dan Mesin	684.026.500	564.316.500	82,50	72.321.819
1.	BM. Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	388.676.500	388.676.500	100,00	-
2.	BM. Pengadaan Alat Rumah Tangga	45.800.000	45.695.000	99,77	32.150.000
3.	BM. Pengadaan Sistim Komputer	124.250.000	17.575.000	14,14	16.671.819
4.	BM. Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	70.000.000	61.000.000	87,14	19.000.000
5.	BM. Pengadaan Alat Komunikasi	55.300.000	51.370.000	92,89	-

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp 119.710.000 adalah belanja modal pengadaan alat rumah tangga Rp. 105.000, belanja modal pengadaan sistim komputer Rp. 106.675.000, belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat Rp. 9.000.000, belanja modal pengadaan alat komunikasi Rp. 3.930.000.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Harga Satuan	Jumlah Unit	Total Harga
1.	Air Conditioner (AC)	8.250.000	4	33.000.000
2.	Air Conditioner (AC)	4.400.000	1	4.400.000
3.	Printer	3.100.000	1	3.100.000
4.	Printer	3.475.000	1	3.475.000
5.	UPS	1.650.000	1	1.650.000
6.	Komputer	9.350.000	1	9.350.000
7.	Lemari Arsip	5.500.000	4	22.000.000
8.	Telepon (PABX)	51.370.000	1	51.370.000
9.	Kendaraan Roda Empat Double Gardan	388.676.500	1	388.676.500
10.	Kursi Kerja Staf	1.400.000	10	14.000.000
11.	Meja Kerja Staf	2.500.000	10	25.000.000
12.	Tabung Racun Api	2.765.000	3	8.295.000

Daftar Belanja Modal Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 21.

**5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA****5.2.1. Aset****Aset Lancar**

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

- 1. Kas di Bendahara Pengeluaran** 0,00 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015. Sampai dengan 31 Desember 2016, sisa UYHD sebesar Rp 72.109.154,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 dan 31 Desember 2016. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2016.

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

- 2. Kas di Bendahara Penerima** 0,00 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 dan 2015. Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2016.

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

- 3. Persediaan** 53.771.000,00 125.914.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan bahan pakai habis	51.080.000,00		2.691.000,00	40.755.000,00
Persediaan bahan/material	74.834.000,00		61.818.000,00	13.016.000,00

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

- 4. Peralatan dan Mesin** 3.012.671.221,00 2.445.436.721,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada BKPM&PPT Prov. Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015.

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 326.360.404,00
 b. Harga Perolehan 2006 sd 2016 Rp. 2.686.310.817,00

Daftar Peralatan dan Mesin BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat yang



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	2.445.436.721,00	567.234.500,00		3.012.671.221,00

Saldo Audited 2015 **2.445.436.721,00**

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2016 564.316.500,00

Mutasi antar SKPD 6.292.000,00

Reklasifikasi

Total Mutasi Tambah **570.608.500,00**

Mutasi Kurang

Reklasifikasi 3.374.000,00

Total Mutasi Kurang **3.374.000,00**

Total Mutasi **567.234.500,00**

Saldo per 31 Des 2016 **3.012.671.221,00**

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 564.316.500,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- Mutasi antar SKPD senilai Rp. 6.292.000,00 yaitu mutasi dari Biro Humas Sekretariat Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima tgl 11 Januari 2016 No. 030/39/I/BAST/BPAD-2016 yang terdiri dari: scanner senilai Rp. 2.200.000,00 dan smartphone senilai Rp. 4.092.000,00.

Penjelasan Mutasi Kurang

- Reklasifikasi senilai Rp. 3.374.000,00 yaitu ke Aset yang sudah tidak bermanfaat yang diusulkan untuk dihapuskan yaitu sebesar Rp. 3.374.000,00

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

5. Aset Tetap Lainnya **10.225.000,00** **10.225.000,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada BKPM&PPT Prov. Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015 .

1) Dasar Penilaian

- Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- Harga Perolehan 2006 sd 2016 Rp. 10.255.000,00



Daftar Aset Tetap Lainnya BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	10.255.000,00	0,00	0,00	10.255.000,00

Saldo Audited 2015 **10.225.000,00**

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2016 0,00

Total Mutasi Tambah **0,00**

Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak dikapitalisir 0,00

Total Mutasi Kurang **0,00**

Total Mutasi **0,00**

Saldo per 31 Des 2016 **10.225.000,00**

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17 .

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

6. Akumulasi Penyusutan **(2.243.917.679,45)** **(2.013.168.587,14)**

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin **(2.243.917.679,45)** **(2.013.168.587,14)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2016 dan 2015. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	(2.013.168.587,24)	(234.123.092,00)	3.374.000,00	(2.243.917.679,45)
Jumlah Akm Penyusutan	(2.013.168.587,24)	(234.123.092,00)	3.374.000,00	(2.243.917.679,45)

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2015 (NERACA)	2.013.168.587,14	-	-	-
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	1.368.400,00			
o Mutasi antar SKPD	1.368.400,00	-	-	-



Koreksi saldo awal akm. Peny peralatan mesin	0,10			
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	3.374.000,00			
o Reklasifikasi	3.374.000,00	-	-	-
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2016	232.754.692,21	-	-	-
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 16	2.243.917.679,45	-	-	-

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 1.368.400,00 yaitu hibah dari Sekretariat Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima tgl 11 Januari 2016 yang terdiri dari: akumulasi penyusutan scanner dan smartphone senilai Rp. 1.368.400,00.
- b) Beban Penyusutan Tahun 2016 adalah Rp. 232.754.692,21
- c) Koreksi saldo awal akm. Peny peralatan mesin Rp. 0,10

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Reklasifikasi senilai Rp. 3.374.000,00 yaitu dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang sudah tidak bermanfaat yang diusulkan untuk dihapuskan yaitu sebesar Rp. 3.374.000,00, sama dengan nilai asetnya.

Penjelasan mutasi tambah kurang diatas adalah per akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jln Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

7. Aset Tidak Berwujud **479.402.800,00** **440.069.069,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2016 dan 2015.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 479.402.800,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	440.069.069,00	39.333.800,00	-	479.402.800,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- 1) Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir menjadi aset senilai Rp. 39.333.800,00 belanja jasa konsultasi design kegiatan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal yaitu Rp. 39.333.800,00

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 18.

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

8. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (479.402.800,00) (440.069.069,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2016 dan 2015.. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm Amortisasi	(352.055.200,00)	(127.347.600,00)	-	(479.402.800,00)

Uraian	Nilai
SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2015 (NERACA)	(352.055.200,00)
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	(31.467.040,00)
o Koreksi + Saldo Awal	(31.467.040,00)
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	-
• BEBAN AMORTISASI TAHUN 2016	(95.880.560,00)
• SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DES 15	(479.402.800,00)

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Koreksi tambah nilai sesuai aplikasi SIMBADA senilai Rp. 31.467.040,00 berdasarkan koreksi nilai karena update aplikasi di tahun 2016 yang mana induknya di tahun 2012, sehingga akumulasi penyusutan yang diakui di beban hanya satu tahun.
- b) Beban Penyusutan Tahun 2016 dalah Rp. 95.880.560,00.

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

9. Aset Lain-lain 479.402.869,00 88.013.800,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2016 dan 2015.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	105.351.675,00	3.374.000,00	108.725.675,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	440.069.069,00	39.333.800,00	-	479.402.869,00

Aset Lain-lain terdiri dari Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp 0,00 dan Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 479.402.869,00.

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

1) Aset Tidak Bermanfaat

Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 0,00 tersebut dicatat berdasarkan nilai buku per 31 Desember 2016.



Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	105.351.675,00	3.374.000,00	108.725.675,00	0,00
Akm Penyusutan	105.351.675,00	3.374.000,00	108.725.675,00	0,00
Nilai Buku	-	-	-	-

Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Aset Tidak Bermanfaat

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Reklasifikasi senilai Rp. 3.374.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Dari peralatan dan mesin senilai Rp. 3.374.000,00 karena merupakan aset yang tidak bermanfaat yang diusulkan untuk dihapuskan.
- Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Bermanfaat dapat dilihat pada Lampiran 18

Penjelasan Mutasi kurang

- a) Penghapusan aset tidak bermanfaat sesuai dengan SK Penghapusan senilai Rp. 108.725.675,00 dengan SK No. 030-1429-2016 tanggal 29 Desember 2016 dan Berita Acara tentang Pemusnahan atau Penjualan SK No. 030-1387-2016 tanggal 22 Desember 2016

Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Akm Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat:**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Reklasifikasi senilai Rp. 3.374.000,00 yaitu dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena merupakan aset yang tidak bermanfaat yang diusulkan untuk dihapuskan sehingga akumulasi penyusutannya juga dimutasikan ke akumulasi penyusutan aset tidak bermanfaat.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Penghapusan senilai Rp. 108.725.675,00 berdasarkan SK Gubernur nomor 030-1429-2016 tanggal 29 Desember 2016 dan Berita Acara tentang Pemusnahan atau Penjualan SK No. 030-1387-2016 tanggal 22 Desember 2016.

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

KEWAJIBAN**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

10. Utang Perhitungan Pihak Ketiga **0,00** **0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015. Utang PFK muncul karena masih adanya pungutan atau potongan rekening pihak ketiga oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke rekening Kas Negara sampai akhir tahun anggaran per 31 Desember 2016 dan 2015.



Daftar pungutan pajak yang telah diterima dan disetorkan tahun 2016 oleh Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada Lampiran 12.

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

11. Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015, Daftar pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada Lampiran 10

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

12. Utang Belanja 219.671.801,00 192.105.909,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2016 dan 2015. Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- Utang belanja pegawai Rp. 208.467.368,00

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp. 93.128.521,00 dan bulan Desember sebesar Rp. 115.338.847,00. Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No 12. Tgl 24 Februari 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Pegawai	184.223.225,00	208.467.368,00	184.223.225,00	208.467.368,00

Penambahan sebesar Rp. 208.467.368,00 adalah utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November dan Desember 2016. Pengurangan sebesar Rp. 184.223.225,00 adalah pembayaran tambahan penghasilan pegawai untuk bulan Januari dan Februari 2016.

- Utang belanja barang dan Jasa Rp. 11.204.433,00

Yaitu utang belanja telp, listrik, air, internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2016 yang dibayarkan bulan Januari 2017.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	7.882.684,00	11.204.433,00	7.882.684,00	11.204.433,00

Penambahan sebesar Rp.11.204.433,00 adalah utang belanja telp, listrik, air, internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2016.

Pengurangan sebesar Rp 7.882.684,00 adalah utang belanja telp, listrik, air, internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2015 yang sudah dibayar pada bulan Februari 2016.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.



EKUITAS

Perkiraan	2016	2015
13. Ekuitas	549.715.606,65	464.345.024,86

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015. Ekuitas ini terdiri dari:

• Ekuitas	469.268.624,86
• Surplus/Defisit LO	(7.480.606.708,21)
• Perubahan SAL	7.551.017.824,00
• Surplus/Defisit LRA	(7.551.017.824,00)
• RK/PPKD	7.561.053.690,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)
5.3.1 PENDAPATAN-LO

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

1. Pendapatan Retribusi Daerah -LO	733.605.720,00	768.982.800,00
------------------------------------	----------------	----------------

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah -LO dalam Tahun 2016 dan Tahun 2015. Bila dibandingkan dengan Tahun 2015, maka terdapat penurunan sebesar Rp 35.377.080,00. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 118,90% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2015, maka terdapat penurunan sebesar Rp 35.377.080 hal ini disebabkan karena pendapatan retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing mengalami penurunan sebesar Rp. 58.443.800,00 atau sebesar 8,34% dibandingkan tahun 2015. Penurunan ini disebabkan karena adanya tenaga kerja asing yang tidak memperpanjang izinnya di tahun 2016 dan tidak adanya perpanjangan kontrak perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Namun, jika dilihat dari target realisasi pendapatan retribusi dari pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi dan pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sudah melebihi target yang ditetapkan.

Pendapatan ini terdiri dari:

- Retribusi Izin Perikanan Rp. 32.793.720,00
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Rp. 700.812.000,00

5.3.2 BEBAN
Beban Operasi

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

a. Beban Pegawai	4.221.785.247,00	4.219.473.900,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO, yaitu :

Uraian	2016	2015
Beban Gaji dan tunjangan	3.127.282.537	2.834.299.124,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	1.077.678.151,00	1.370.526.651,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.077.678.151,00	1.370.526.651,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.824.559,00	14.648.125,00
Jumlah Beban Pegawai	4.221.785.247,00	4.219.473.900,00

Saldo / jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban pegawai selama tahun 2016 sejumlah Rp. 3.780.000 yang terdiri dari: beban tunjangan jabatan Rp. 3.780.000 atas nama Guspri Yeni.



LAPORAN KEUANGAN 2016 BASIS AKRUAL

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
• Gaji dan tunjangan	3.127.282.537,00	3.127.282.537,00	-
• Tambahan Penghasilan PNS	1.053.434.008,00	1.077.678.151,00	24.244.143
• Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.824.559,00	16.824.559,00	-
Jumlah	4.197.541.104,00	4.221.785.247,00	24.244.143

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan Nov sebesar Rp. 93.128.521,00 dan bulan Desember 2016 sebesar Rp. 115.338.847,00 berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan Nov dan Desember 2016 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi pada Jan dan Februari 2016 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Des 2016.
- Penyesuaian untuk pembayaran utang belanja pegawai tahun 2015 yaitu utang belanja pegawai bulan November 2015 sebesar Rp. 91.553.789,00 dan bulan Desember 2016 sebesar Rp. 92.669.436,00

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja		184.223.225	208.467.368		24.244.143	
Jumlah		184.223.225	208.467.368		24.244.143	

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

b. Beban Barang & Jasa **3.558.896.889,00** **3.603.557.943,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Beban Barang & Jasa	3.558.896.889,00
Beban Bahan Pakai Habis	296.577.945
1. Beban persediaan alat tulis kantor	89.244.600
2. Beban persediaan alat listrik dan elektronik	7.498.000
3. Beban persediaan perangko, materai, dan benda pos lainnya	10.420.000
4. Beban persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.169.000
5. Beban persediaan BBM/Gas	88.858.345
6. Beban Seminar Kit Peserta	14.125.000
7. Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	75.263.000
Beban Jasa Kantor	285.642.297
8. Beban jasa telepon	11.992.300



9.	Beban jasa listrik	133.914.163
10.	Beban jasa surat kabar/majalah	12.000.000
11.	Beban jasa kawat/faksimili/internet	37.700.000
12.	Beban jasa publikasi	300.000
13.	Beban jasa akomodasi	17.999.300
14.	Beban transportasi	41.901.991
15.	Beban jasa dekorasi	29.834.543
	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	63.050.284
16.	Beban jasa service	16.306.269
17.	Beban penggantian Suku Cadang	30.418.795
18.	Beban BBM/Gas dan Pelumas	11.617.120
19.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	4.708.100
	Beban Cetak dan Penggandaan	193.028.750
20.	Beban Cetak	140.995.500
21.	Beban Penggandaan	52.033.250
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	84.600.000
22.	Beban sewa gedung/kantor/tempat	80.000.000
23.	Beban sewa ruang rapat/pertemuan	4.600.000
	Beban Makanan dan Minuman	138.420.000
24.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	53.585.000
25.	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	67.795.000
26.	Beban Makanan dan Minuman Harian Pengaman	17.040.000
	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	31.320.000
27.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	31.320.000
	Beban Pakaian Kerja	5.669.000
28.	Beban Pakaian Kerja Lapangan	5.669.000
	Beban Perjalanan Dinas	1.804.716.780
29.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	918.900.000
30.	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	810.926.780
31.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	74.890.000
	Beban Pemeliharaan	80.787.200
32.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.787.200
33.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000
	Beban Jasa Konsultansi	148.062.000
34.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	128.062.000
35.	Beban Jasa Konsultansi survellen/assesmen	20.000.000
	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek PNS	3.675.000
36.	Beban Sosialisasi	1.875.000
	Beban Bimbingan Teknis	1.800.000
	Honorarium PNS	
37.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa- LO	1.450.000
38.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber- LO	14.600.000
39.	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah-LO	118.050.000
40.	Honorarium Pengelola Asset Daerah-LO	17.400.000
41.	Honorarium Pengelola SIPKD-LO	30.000.000
42.	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD-LO	9.600.000
43.	Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD-LO	6.000.000
44.	Honorarium Pengelola SIMBANGDA-LO	2.500.000
	Honorarium Non PNS	210.747.633



45.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-LO	49.150.000
46.	Beban Jasa Moderator	8.500.000
47.	Beban Jasa Penerjemah	9.000.000
48.	Beban Jasa MC/Pembawa Acara	3.800.000
49.	Beban Pembaca Doa/Al-Quran	1.000.000
50.	Beban Jasa Pengamanan Kantor	61.264.458
51.	Beban Jasa Petugas Kebersihan	74.483.175
52.	Beban Jasa Peliputan	300.000
53.	Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan	3.250.000
	Beban Kontribusi	4.000.000
54.	Beban Kontribusi Pelatihan/Magang	4.000.000
	Beban Vakasi/Verifikasi	9.000.000
55.	Beban Verifikasi	9.000.000
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	360.102.292,21
56.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	232.754.692,21
57.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	127.347.600

Saldo/umlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban barang dan jasa selama tahun 2016 sejumlah Rp. 5.949.865,00 yang terdiri dari: setoran kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar daerah Rp. 5.949.865,00.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
Belanja Bahan Pakai Habis	286.252.945	296.577.945	(10.325.000)
Belanja Jasa Kantor	282.320.548	285.642.997	(3.322.449)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	63.050.284	63.050.284	-
Belanja Cetak dan Penggandaan	131.210.750	193.028.750	(61.818.000)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	84.600.000	84.600.000	-
Belanja Makanan dan Minuman	138.420.000	138.420.000	-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	31.320.000	31.320.000	-
Belanja Pakaian Kerja	5.669.000	5.669.000	-
Belanja Perjalanan Dinas	1.804.716.780	1.804.716.780	-
Belanja Pemeliharaan	80.787.200	80.787.200	-
Belanja Jasa Konsultansi	187.395.800	148.062.000	39.333.800
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek PNS	28.950.000	3.675.000	25.275.000
Honorarium PNS	199.600.000	199.600.000	-
Honorarium Non PNS	210.747.633	210.747.633	-
Belanja Kontribusi	4.000.000	4.000.000	-
Belanja vakasi/verifikasi	9.000.000	9.000.000	-



Beban Penyusutan dan Amortisasi		360.102.292,21	(360.102.292,21)
Jumlah	3.522.765.940	3.558.896.889	(6.130.949)

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Bahan Pakai Habis	3.024.500		7.273.500		10.298.000	
• Belanja Bahan/Material	73.428.000			11.610.000	61.818.000	
Jumlah	76.452.500		7.273.500	11.610.000	72.116.000	

- Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2016 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2016.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Jasa Kantor		7.882.684	11.204.433		3.321.749	
Jumlah		7.882.684	11.204.433		3.321.749	

- Penyesuaian untuk beban barang dan jasa yang dikapitalisir menjadi Aset Lainnya sebesar Rp. 39.333.800 yaitu aset tidak berwujud berupa belanja jasa konsultasi kegiatan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal sebesar Rp. 39.333.800.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Barang Jasa				39.333.800		39.333.800
Jumlah				39.333.800		39.333.800

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

c. **Beban Penyusutan dan Amortisasi** **360.102.292,21** **338.958.280,14**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 232.754.692,21
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 127.347.600,00

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2016
1. Ekuitas Awal	464.345.024,86
2. Surplus/Defisit LO	(7.407.178.708,21)
3. RK PPKD	7.551.017.824,00
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
• Mutasi Tambah Aset Tetap	4.923.600,00
5. Ekuitas Akhir	613.107.740,65

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 464.345.024,86 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Des 2015.
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 7.407.178.708,21 adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2016
3. RK PPKD sebesar Rp. 7.551.017.824,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2016 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - Mutasi Tambah Aset Tetap sebesar Rp 4.923.600,00 yaitu hibah aset tetap dari Sekretariat Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima tgl 11 Januari 2016
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp 613.107.740,65 adalah saldo Ekuitas BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016.

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak	-	-	-
• Pendapatan Retribusi	733.605.720,00	733.605.720,00	-
• Lain-lain PAD Yg Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	733.605.720,00	733.605.720,00	-
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	4.197.541.104,00	4.221.785.247,00	(24.244.143,00)
• Belanja Brg & Jasa	3.522.765.940,00	3.198.794.596,79	323.971.343,21
• Belanja Modal	564.316.500,00	0,00	564.316.500,00
• Beban Penyusutan & Amortisasi	-	360.102.292,21	(360.102.292,21)
Jumlah Beban Operasi	8.284.623.544,00		

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

6.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 95 Tahun 2009, BKPMP mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan Penanaman Modal. Didalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut BKPMP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Koordinasi Penanaman Modal Provinsi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, promosi dan kerjasama, pelayanan dan pengendalian;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Koordinasi Penanaman Modal Provinsi;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Umum
 - 2). Sub Bagian Kepegawaian
 - 3). Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Analisa Program
 - 2). Sub Bidang Data dan Informasi
4. Bidang Promosi dan Kerjasama terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Promosi dan Pengembangan

- 2). Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama
5. Bidang Pengendalian dan Pembinaan terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pengendalian dan Penanaman Modal
 - 2). Sub Bidang Pembinaan dan Penanaman Modal
6. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - 1). Sub. Bidang Pelayanan Perizinan
 - 2). Sub. Bidang Pelayanan Non Perizinan

Adapun jumlah Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat per 30 Desember 2016 berjumlah 54 orang, dengan susunan sebagai berikut :

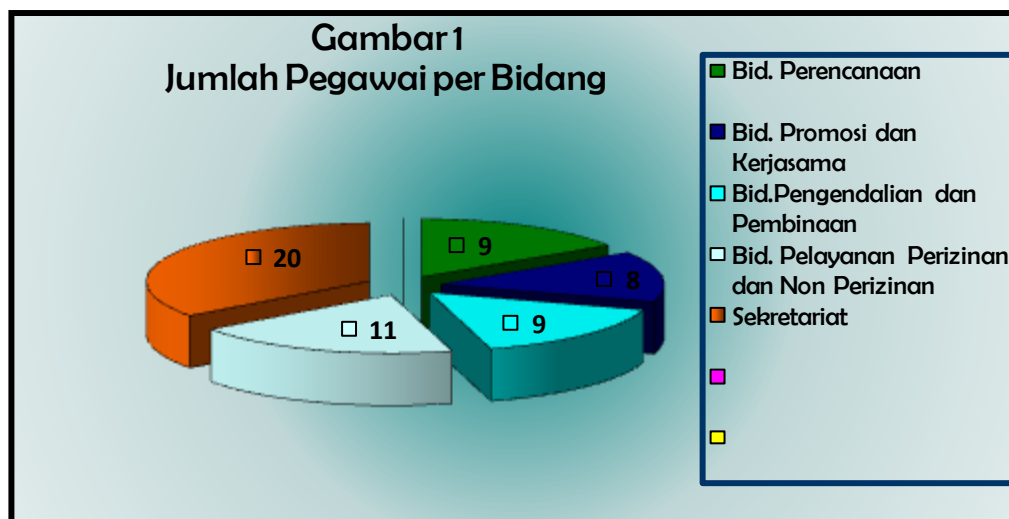
a. Jumlah Pegawai per Bidang :

Tabel I.

Jumlah Pegawai per Bidang

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	20 orang
2.	Bidang Perencanaan	9 orang
3.	Bidang Promosi dan Kerjasama	8 orang
4.	Bidang Pengendalian dan Pembinaan	9 orang
5.	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	11 orang
	Jumlah	57 orang

Tabel di atas dapat disajikan dalam diagram berikut :



Sementara itu berdasarkan jabatan struktural adalah sebagai berikut:

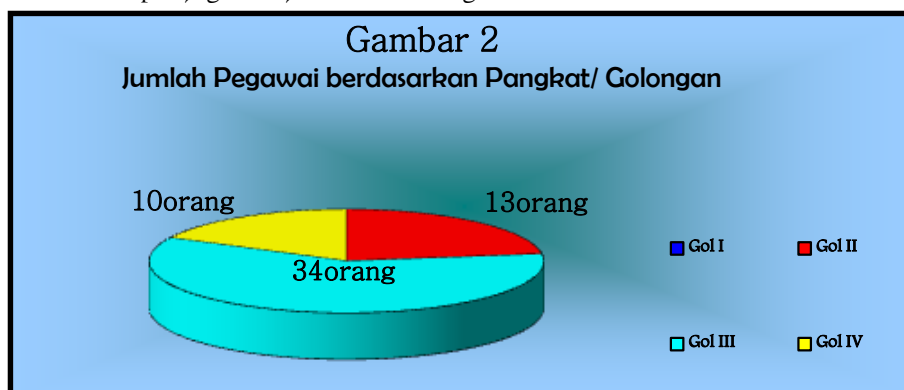
- 1. Eselon II a : I (satu) orang
- 2. Eselon III a : 3 (tiga) orang
- 3. Eselon IV a : II (sebelas) orang
- Staf : 42 (empat puluh dua orang)

b. Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan:

Tabel 2.
Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I/a	-
2	I/b	-
3	I/c	-
4	I/d	-
5	II/a	1 orang
6	II/b	4 orang
7	II/c	7 orang
8	II/d	1 orang
9	III/a	4 orang
10	III/b	14 orang
11	III/c	7 orang
12	III/d	9 orang
13	IV/a	7 orang
14	IV/b	3 orang
15	IV/c	-
16	IV/d	-
17	IV/e	-
	Jumlah	57 orang

Tabel di atas dapat juga disajikan dalam diagram berikut:



c. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 3.
Jumlah Pegawai pada BKPM&PPT Prov.Sumbar
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SLTA	16 orang
4	DIII	7 orang
5	SI	24 orang
6	S2	10 orang
Jumlah		57 orang

6.3 Aspek Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya meningkatkan investasi di Sumatera Barat, BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk berkoordinasi dengan instansi terkait pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta dunia usaha. Baik dalam upaya penyelesaian permasalahan/kendala didalam pelaksanaan penanaman modal maupun dalam mensinergikan progam kegiatan secara formal melalui forum dan pertemuan koordinasi perencanaan. BKPM &PPT Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan Pertemuan koodinasi perencanaan dengan instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota serta telah mengikuti Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal (KP3MN) ditingkat regional dan nasional. Pada masing-masing pertemuan tersebut telah dibahas permasalahan dan tindak lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal dengan instansi terkait provinsi dan kabupatenkota serta di wilayah Sumatera dan Nasional. Pada pertemuan tersebut juga telah disinergikan program/kegiatan antara kabupaten/kota, regional dan nasional.

Permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fingsi BKPM adalah:

- I. Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, antara lain disebabkan masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara profesional dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal.

2. Dokumen informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (master plan feasibility study, DED, bussiness plan) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai. Data dan Informasi Potensi daerah yang dipromosikan kepada calon investor belum akurat.
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN serta masih banyaknya perusahaan PMA/PMDN yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
4. Dokumen perencanaan pendukung investasi di daerah yang dibutuhkan oleh calon investor belum memadai.
5. Perusahaan PMA/PMDN masih kurang terbuka terhadap permasalahan yang dihadapinya dan tidak melaporkannya ke BKPM&PPT Sumbar selaku Tim Task Force Investasi di tingkat Provinsi.
6. Keuangan negara dan keuangan daerah belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai serta untuk pembiayaan upaya-upaya peningkatan penanaman modal.
7. Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten, lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga, disamping itu efisiensi peradilan dalam penyelesaian sengketa masih rendah dan biaya untuk mendapatkan kepastian hukum dari peradilan di Indonesia relatif tinggi, dibandingkan negara-negara di Asia, peradilan di Indonesia termasuk lama dalam penyelesaian sengketa usaha.

Dari permasalahan di atas dapat direkomendasikan solusinya sebagai berikut:

- a. Peningkatan jumlah dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis dengan memberikan pelatihan teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya dan melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan investasi.
- b. Tetap melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih akurat serta meningkatkan kualitas bahan materi promosi terhadap potensi dan peluang investasi dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal terhadap PMA/PMDN yang terkendala didalam penyampaian LKPM dengan diupayakan langsung ke lokasi proyek.
- d. Memberi dukungan terhadap permasalahan investasi dengan melakukan pendekatan persuasif dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, serta meningkatkan ketertiban dan meningkatkan kinerja tim task force penanaman modal.



- e. Perlunya peningkatan sarana prasarana (Jalan, Bandara, Pelabuhan, Air bersih, kelistrikan dan fasilitas umum lainnya).

BAB VII

Penutup

7.1 Kesimpulan

Pada tahun 2016 Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dan melaksanakan 7 (tujuh) Program dengan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan yang didalam pencapaian target telah ditetapkan boleh dikatakan hampir tidak ada kendala, dari target yang telah ditetapkan 6,27% keuangan yang tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target.

- a. Dalam Tahun Anggaran 2016 pada BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat anggaran sebesar Rp. 8.838.488.705,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.308.747.705,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.845.714.500,00 total realisasi belanja sebesar Rp. 8.284.623.544,00 (93,73%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.197.541.104,00 (97,42%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.087.082.440,00 (90,23%) dari jumlah anggaran.
- b. Kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0 (Nihil). Persediaan terdiri dari : Pengadaan Alat Tulis Kantor, Cetak pakai habis per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 53.771.000,- yang nantinya merupakan cadangan persediaan. Utang belanja sebesar Rp. 219.671.801,00.
- c. Untuk tahun 2016 Aset tetap yang mengalami penambahan adalah Peralatan dan Mesin.

7.2 Saran

1. Perlu ditingkatkan Perencanaan yang lebih baik di dalam Penyusunan Anggaran, sehingga penggunaan dana dapat lebih optimal sesuai dengan dana yang tersedia.
2. Perlunya ditingkatkan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Perlunya penambahan Staf dibidang Akuntansi.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

URAIAN	2016	2015
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
-Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
-Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
-Kas di BLUD	-	-
-Setara Kas	-	-
Piutang Pendapatan		
-Piutang Pajak Daerah	-	-
-Piutang Retribusi	-	-
Penyisihan Piutang		
-Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan	53,771,000.00	125,914,000.00
Jumlah Aset Lancar	53,771,000.00	125,914,000.00
ASET TETAP		
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	3,012,671,221.00	2,445,436,721.00
Gedung dan Bangunan	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	10,255,000.00	10,255,000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	(2,243,917,679.45)	(2,013,168,587.14)
Jumlah Aset Tetap	779,008,541.55	442,523,133.86
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	-	88,013,800.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(479,402,800.00)	(352,055,200.00)
Aset Tidak Berwujud	479,402,800.00	440,069,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
Jumlah Aset Lainnya	-	88,013,800.00
JUMLAH ASET	832,779,541.55	656,450,933.86
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Belanja	219,671,801.00	192,105,909.00
Utang Belanja Pegawai	208,467,368.00	184,223,225.00
Utang Belanja Barang dan Jasa	11,204,433.00	7,882,684.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	219,671,801.00	192,105,909.00
JUMLAH KEWAJIBAN	219,671,801.00	192,105,909.00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas		
-Ekuitas	469,268,624.76	391,651,838.00
-Surplus/Defisit-LO	(7,407,178,708.21)	(7,393,007,323.14)
Ekuitas SAL		
Perubahan SAL	7,551,017,824.00	7,465,700,510.00
Surplus/Defisit-LRA	(7,551,017,824.00)	(7,465,700,510.00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan		
RK PPKD	7,551,017,824.00	7,465,700,510.00
Jumlah Ekuitas	613,107,740.55	464,345,024.86
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	832,779,541.55	656,450,933.86

Padang, 31 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M.Si

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(SAP)
TAHUN 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	617,000,000.00	733,605,720.00	118.90	768,982,800.00
Pajak Daerah	-	-	-	-
Retribusi Daerah	617,000,000.00	733,605,720.00	118.90	768,982,800.00
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	617,000,000.00	733,605,720.00	118.90	768,982,800.00
JUMLAH PENDAPATAN	617,000,000.00	733,605,720.00	118.90	768,982,800.00
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	4,308,747,705.00	4,197,541,104.00	97.42	4,035,250,675.00
Belanja Barang dan Jasa	3,845,714,500.00	3,522,765,940.00	91.60	3,783,397,416.00
Jumlah Belanja Operasional	8,154,462,205.00	7,720,307,044.00	94.68	7,818,648,091.00
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	684,026,500.00	564,316,500.00	82.50	72,321,819.00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	343,713,400.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	684,026,500.00	564,316,500.00	82.50	416,035,219.00
JUMLAH BELANJA	8,838,488,705.00	8,284,623,544.00	93.73	8,234,683,310.00
SURPLUS/DEFISIT	(8,221,488,705.00)	(7,551,017,824.00)	91.84	(7,465,700,510.00)

Padang, 31 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M.Si
NIP. 19740618 199311 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(VERSI PERMENDAGRI 13)
TAHUN 2016

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Sisa Anggaran
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	617,000,000.00	733,605,720.00	118.90	-
Pajak Daerah	-	-	-	-
Retribusi Daerah	617,000,000.00	733,605,720.00	118.90	-
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	617,000,000.00	733,605,720.00	118.90	-
JUMLAH PENDAPATAN	617,000,000.00	733,605,720.00	118.90	-
BELANJA				
BELANJA LANGSUNG	4,529,741,000.00	4,087,082,440.00	90.23	442,658,560.00
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	3,845,714,500.00	3,522,765,940.00	91.60	322,948,560.00
Belanja Modal	684,026,500.00	564,316,500.00	82.50	119,710,000.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,308,747,705.00	4,197,541,104.00	97.42	111,206,601.00
Belanja Pegawai	4,308,747,705.00	4,197,541,104.00	97.42	111,206,601.00
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
Belanja Modal				
JUMLAH BELANJA	8,838,488,705.00	8,284,623,544.00	93.73	553,865,161.00
SURPLUS/DEFISIT	(8,221,488,705.00)	(7,551,017,824.00)	91.84	

Padang, 31 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M.Si

NIP. 19740618 199311 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2016

Uraian	2016
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Pajak Daerah-LO	-
Retribusi Daerah-LO	733,605,720.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	-
Lain-lain PAD yang Sah-LO	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	733,605,720.00
JUMLAH PENDAPATAN	733,605,720.00
BEBAN	
BEBAN OPERASI	
Beban Pegawai	4,221,785,247.00
Beban Barang dan Jasa	3,558,896,889.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	360,102,292.21
Beban Penyisihan Piutang	-
JUMLAH BEBAN	8,140,784,428.21
SURPLUS/DEFISIT LO	(7,407,178,708.21)

Padang, 31 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M.Si
NIP. 19740618 199311 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2016

NOMOR	URAIAN	2015
1	EKUITAS AWAL	464,345,024.86
2	Koreksi Ekuitas	4,923,599.90
3	Surplus/Defisit - LO	(7,407,178,708.21)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-
5	RK PPKD	7,551,017,824.00
6	EKUITAS AKHIR	613,107,740.55

Padang, 31 Desember 2016
Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M.Si
NIP. 19740618 199311 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BKPM & PPT PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR REALISASI SP2D, SPJ DAN SISA UYHD TAHUN 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	TOTAL SP2D GU	2,848,699,159
2	TOTAL SP2D LS	4,808,763,404
3	TOTAL SP2D TU	
4	JUMLAH SP2D (JUMLAH 1+2+3)	7,657,462,563
5	SPJ UYHD/GU NIHIL	636,890,846
6	BELANJA KOTOR (JUMLAH 4+5)	8,294,353,409
7	TOTAL CP GU	5,949,865
8	TOTAL CP LS	3,780,000
9	TOTAL CP TU	
10	TOTAL CP (JUMLAH 7+8+9)	9,729,865
	Penyetoran Contra Post di bulan Agustus 2016:	
	▪ Tgl 05/08/2016 Rp. 3,780,000	
	Penyetoran Contra Post di bulan Desember 2016:	
	▪ Tgl 30/12/2016 Rp. 5,949,865	
11	BELANJA BERSIH (SALDO 6-10)	8,284,623,544
12	UP	709,000,000
	Diterima Tanggal:	
	▪ Tgl 02/02/2016 Rp 709,000,000	
13	SPJ UYHD/GU NIHIL = NO 5	636,890,846
14	SISA UYHD	72,109,154
	Penyetoran Sisa UYHD :	
	▪ Tgl 30/12/2016 Rp 62,379,288	
	▪ Tgl 31/12/2016 Rp 9,729,866	

Padang, 30 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M. Si

NIP. 19740618 199311 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BKPM & PPT PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR REKAPITULASI PENDAPATAN TAHUN 2016

NO	BULAN	Jenis Pendapatan			JUMLAH
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	
1	JANUARI		50,783,200.00		
2	FEBRUARI		115,055,800.00		115,055,800.00
3	MARET		49,291,000.00		49,291,000.00
4	APRIL		40,389,600.00		40,389,600.00
5	MEI		32,951,200.00		32,951,200.00
6	JUNI		33,246,200.00		33,246,200.00
7	JULI		57,160,400.00		57,160,400.00
8	AGUSTUS		72,942,000.00		72,942,000.00
9	SEPTEMBER		9,199,600.00		9,199,600.00
10	OKTOBER		173,220,800.00		173,220,800.00
11	NOVEMBER		24,150,800.00		24,150,800.00
12	DESEMBER		75,215,120.00		75,215,120.00
Jumlah			733,605,720.00	-	733,605,720.00

Padang, 30 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M.Si

NIP. 19740618 199311 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BKPM & PPT PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR PENYETORAN KEMBALI BELANJA (CONTRA POST BELANJA) BERDASARKAN GU/TU/LS

NO	URAIAN/ OBJEK BELANJA	GU (Rp)	TU (Rp)	LS (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	Januari					
a						
2	Februari					
a						
3	Maret					
a						
4	April					
a						
5	Mei					
a						
6	Juni					
a						
7	Juli					
a						
8	Agustus					
a	Setoran kelebihan pembayaran tunjangan struktural An. Guspri Yeni tahun 2016	5 Agustus 2016		3,780,000	3,780,000	
9	September				-	
a					-	
10	Oktober				-	
a					-	
11	November				-	
a					-	
12	Desember				-	
a	Setoran kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar daerah	30 Desember 2016	5,949,865		5,949,865	
	Jumlah		5,949,865	-	3,780,000	9,729,865

Padang, 30 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M.Si

NIP. 19740618 199311 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BKPM &PPT PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR PENYETORAN KEMBALI BELANJA (CONTRA POST BELANJA) BERDASARKAN JENIS BELANJA

NO	URAIAN/ OBJEK BELANJA	B Pegawai (BTL)	B Pegawai (Langsung)	B Barang & Jasa	B Modal				
					Tanah	P &M	Gedung dan Bangunan	Jln, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
1	Januari								
a									
2	Februari								
a									
3	Maret								
a									
4	April								
a									
5	Mei								
a									
6	Juni								
a									
7	Juli								
a									
8	Agustus								
a	Pembayaran setoran kelebihan pembayaran tunjangan struktural an Guspri Yeni th 2016 atas hasil temuan inspektorat	3,780,000							
9	September								
a									
10	Oktober								
a									
11	November								
a									
12	Desember								
a	Setoran kelebihan perjalanan dinas luar daerah setelah perubahan	02 Desember 2015		5,949,865					
	Jumlah	3,780,000		5,949,865					

Padang, 30 Desember 2016
Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M. Si
NIP. 19740618 199311 1 001



LAMPIRAN 7

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BKPM &PPT PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR PIUTANG PAJAK & PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2016

NO	NAMA JENIS PAJAK	JUMLAH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2015	UMUR PIUTANG					Penyisihan
			< 1 th	1 th	2 th	3 th	> 3 th	
1				50%	50%	50%	100%	
2			NIHIL					
3								
	JUMLAH							

Padang, 31 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M. Si
NIP. 19740618 199311 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BKPM &PPT PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI & PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2016

NO	Uralan/ Nama Debitur	JUMLAH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2015	UMUR PIUTANG					Penyisihan
			< 1 th	> 1 th	2 th	3 th	> 3 th	
				50%	50%	50%	100%	
1								
2			NIHIL					
3								
	JUMLAH							

Padang, 31 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M. Si
NIP. 19740618 199311 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BKPM &PPT PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR PIUTANG LAIN2 PAD YG SAH & PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2016

NO	Uralan/ Nama Debitur	JUMLAH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2015	UMUR PIUTANG					Penyisihan
			< 1 th	> 1 th	2 th	3 th	> 3 th	
				50%	50%	50%	100%	
1								
2			NIHIL					
3								
	JUMLAH							

Padang, 31 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M. Si
NIP. 19740618 199311 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BKPM & PPT PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA per 30 Desember 2016
(Tidak Termasuk Sewa Rumah Dinas)**

No	Uraian	Jml Pendapatan LRA	Jml Pendapatan LO	Jml Pendapatan Diterima Dimuka
		Rp	Rp	Rp
1	Retribusi Izin Perikanan	32,793,720	32,793,720	
2	Retribusi Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	700,812,000	700,812,000	
	Jumlah	733,605,720	733,605,720	

Padang, 30 Desember 2016
Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, Ap, M. Si
NIP. 19740618 199311 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BKPM & PPT PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR BEBAN BAYAR DIMUKA per 30 Desember 2016

No	Uraian	Jml Beban LRA	Jml Beban LO	Jml Beban Bayar Dimuka	Keterangan : Beban Pegawai atau Beban Brg Jasa
		Rp	Rp	Rp	
1					
2	NIHIL				
3					
	Jumlah				

Padang, 30 Desember 2016
Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, Ap, M. Si
NIP. 19740618 199311 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BKPM & PPT PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK TAHUN 2016

No	Bulan	Penerimaan						Penyetoran						Sisa	
		PPH Psl 21	PPH Psl 22	PPH Psl 23	PBB/PPH Psl 4/26	PPN	Jumlah	PPH Psl 21	PPH Psl 22	PPH Psl 23	PBB/PPH Psl 4/26	PPN	Jumlah		
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	17,582,501	659,468	1,368,818	-	12,031,155	31,641,942	17,582,501	659,468	1,368,818	-	12,031,155	31,641,942	-	
3	Maret	9,269,880	-	382,725	-	2,037,035	11,689,640	9,269,880	-	382,725	-	2,037,035	11,689,640	-	
4	April	8,976,646	-	454,545	-	2,444,722	11,875,913	8,976,646	-	454,545	-	2,444,722	11,875,913	-	
5	Mei	8,639,193	-	454,545	-	2,706,127	11,799,865	-	-	-	-	-	-	11,799,865	
6	Juni	7,690,047	-	-	-	3,693,954	11,384,001	16,329,240	-	454,545	-	6,400,081	23,183,866	(11,799,865)	
7	Juli	6,396,715	-	-	-	390,000	6,786,715	5,786,715	-	-	-	115,000	5,901,715	885,000	
8	Agustus	8,583,101	-	454,545	-	2,442,727	11,480,373	8,329,351	-	-	-	445,000	8,774,351	2,706,022	
9	September	6,324,825	-	569,454	-	2,847,272	9,741,551	7,188,575	-	1,023,999	-	5,119,999	13,332,573	(3,591,022)	
10	Oktober	8,503,606	34,575	38,872	-	872,900	9,449,953	-	-	-	-	-	-	9,449,953	
11	November	2,128,750	-	-	-	200,000	2,328,750	-	-	-	-	-	-	2,328,750	
12	November	7,293,493	-	-	727,275	1,932,401	9,953,169	17,925,849	34,575	38,872	-	1,072,900	19,072,196	(9,119,027)	
13	Desember	15,286,320	577,270	3,389,376	-	21,888,587	41,141,553	15,286,320	577,270	3,389,376	727,275	23,820,988	43,801,229	(2,659,676)	
	Jumlah	106,675,077	1,271,313	7,112,880	727,275	53,486,880	169,273,425	106,675,077	1,271,313	7,112,880	727,275	53,486,880	169,273,425	-	

Padang, 30 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, Ap. M. Si
NIP. 19740618 199311 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BKPM &PPT PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR HUTANG BELANJA per 30 Desember 2016

No	Nama Pihak Ketiga / PNS	Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Brg Jasa	Belanja Modal	Jumlah
			Rp	Rp	Rp	Rp
1	MASWAR DEDI, AP, M.Si		18,863,640			18,863,640
2	WIDYA SARI, SE.AK, MM		7,283,018			7,283,018
3	FATMA IRYANI, SH		4,640,920			4,640,920
4	YUHARLEM		2,303,880			2,303,880
5	SYAFRIZAL ARSYLAN		2,132,160			2,132,160
6	HARNI NOVITA, A.Md		2,127,200			2,127,200
7	AGUSLIR		2,160,440			2,160,440
8	SYAHRUL		2,149,360			2,149,360
9	ARIANTO		2,204,760			2,204,760
10	SYAHRIL		2,193,680			2,193,680
11	SYAFWIRDI,SE,M.Si		2,449,600			2,449,600
12	MAINELIZA, SE		2,479,280			2,479,280
13	SRIWAH YULIASTI		2,322,960			2,322,960
14	NOVA SISKA, SE		2,373,840			2,373,840
15	RONALD		2,278,440			2,278,440
16	MILTA		2,350,060			2,350,060
17	NOVLI YANTI, A.Md		2,182,600			2,182,600
18	Ir. H. OLLYANDES, SPT		8,577,070			8,577,070
19	ADI USMAN, S.Pt		4,524,694			4,524,694
20	SUARDI, SH		2,335,680			2,335,680
21	YUNELI, S.Sos		4,795,888			4,795,888
22	ZULFRIYADI		2,160,440			2,160,440
23	AIRIL FURQAN, SE		2,361,120			2,361,120
24	BIMBI IRAWAN, ST, MT		3,592,000			3,592,000
25	DINA SUHARTINA, SE		2,335,680			2,335,680
26	WASTINI, SH, M.Hum		7,273,333			7,273,333
27	YENI FITRA, SS, M.CIO		3,468,832			3,468,832
28	HENDRI ISWANDI		2,210,300			2,210,300
29	HENDRI AGUNG I,B.Mgt,MHPS		2,449,600			2,449,600
30	M. KHADAFI, SE		2,202,120			2,202,120
31	MHD. RIDWAN AFIF, SE		4,736,484			4,736,484
32	FAKHRIZAL		2,297,520			2,297,520
33	DELMI, B.Sc		9,001,340			9,001,340
34	FEBRIA SABRINA, S.Kom, M.Si		5,332,800			5,332,800
35	MISTILDA, B.Ac		2,278,440			2,278,440
36	DESVITA MAYANGSARI, SE.MM		2,575,100			2,575,100
37	YUSNARRELIS,SH		1,158,200			1,158,200
38	AMRIZAL, S.Sos		2,342,040			2,342,040
39	HARDI,SE,MM,AK		2,449,600			2,449,600
40	DESMELLY		2,291,160			2,291,160
41	INDRA UTAMA,AP,M.Si		4,523,000			4,523,000
42	ASWANDI, SE		3,629,966			3,629,966
43	LYRA MONICA, SE		2,348,400			2,348,400
44	GOLDY HARTES		2,204,760			2,204,760
45	EDWARDIN, B.Sc		4,361,978			4,361,978
46	YEFFI		2,399,280			2,399,280

47	MAIYAR HARTATI, B.Ac		2,284,800		2,284,800
48	UCHIE ZOLINA, S.STP		2,373,840		2,373,840
49	JHONI R		2,232,460		2,232,460
50	JUHELMI		2,215,840		2,215,840
51	ASRUL, SE		3,424,312		3,424,312
52	MOLLY FRANSISKI, S.Kom		2,348,400		2,348,400
53	ETNALELIS, S.Sos, MM		4,523,000		4,523,000
54	WERY, B.Ac		4,813,968		4,813,968
55	RIO SAHZAN, SS		2,405,640		2,405,640
56	YUNIARTI, S.Pd, M.Si		4,971,242		4,971,242
57	ERNA RASTUTI		2,265,720		2,265,720
58	RICKY MARTIN, S.Pi		4,284,494		4,284,494
59	Drs. DANANG W JATI, DUM.MURP		4,411,350		4,411,350
60	UPITA WAIDA		1,199,640		1,199,640
					-
	Beban Jasa Telepon			923,207	923,207
	Beban Jasa Listrik			7,381,226	7,381,226
	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet			2,900,000	2,900,000
	Jumlah		208,467,368	11,204,433	219,671,801

Padang, 30 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, Ap, M. Si

NIP. 19740618 199311 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BKPM &PPT PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR PENERIMAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
SEWA RUMAH DINAS TAHUN 2016

No	Nama	SIP		Sewa/bulan	Penyetoran				Jumlah Pendapatan LRA	Jumlah Pendapatan LO	Jumlah Piutang Sewa	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
		No	Tgl		Tgl	Rp	Nama Penyetor	Uraian				
N I H I L												

Padang, 30 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, Ap, M. Si

NIP. 19740618 199311 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BKPM & PPT PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR) BESERTA
PENYISIHANNYA PER 30 Des 2016

No.	KAB/KOTA	PLAFON	Pembayaran s/d 2015	Pembayaran s/d 2016	Jml Pembayaran	Tunggakan	Umur Piutang										Penyisihan	
							<1	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
N I H I L																		
	Jumlah																	

Padang, 30 Desember 2016
Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, Ap, M. Si
NIP. 19740618 199311 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BKPM & PPT PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR PERSEDIAAN PER 30 DESEMBER 2016

No.	No.rincian	Nama Barang	Satuan	Vol.	Harga Satuan	Nilai (Rp)			
						Barang Pakai Habis	Bahan Material	Barang Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persediaan				40,755,000	13,016,000		
		Persediaan Bahan Pakai habis							
	01	Persediaan ATK							5,619,000
1		Kertas kwarto	rim	20	41,000	820,000			820,000
2		Kertas folio	rim	10	42,500	425,000			425,000
3		Kertas faximile	rol	16	16,500	264,000			264,000
4		Kertas NCR folio	rim	4	60,000	240,000			240,000
5		Snelhecter plastik	bh	2	150,000	300,000			300,000
6		Peluang kertas	bh	5	23,000	115,000			115,000
7		Pisau cater L-500	bh	5	20,000	100,000			100,000
8		Toner laser jet 12A	bh	3	850,000	2,550,000			2,550,000
9		Buku tulis folio	bk	10	20,000	200,000			200,000
10		Leterfile bambi	bh	10	27,500	275,000			275,000
11		Leterfile combo	bh	12	27,500	330,000			330,000
	04	Persediaan Prangko, materai dan benda pos lainnya							45,000
12		Materai	lbr	15	3,000	45,000			45,000
	05	Persediaan Peralatan Kebersihan							46,000
13		Wipol	bh	1	17,000	17,000			17,000
14		Porstek	bh	2	14,500	29,000			29,000
	07	Persediaan isi tabung pemadam kebakaran							45,000
	09	Persediaan Bahan pakai habis lainnya							35,000,000
15		Souvenir eksklusif	bh	20	500,000	10,000,000			10,000,000
16		Tas promosi	bh	250	100,000	25,000,000			25,000,000
		Persediaan Bahan Pakai habis							
	11	Persediaan Bahan Dokumentasi/Cetakan							13,016,000
17		Amplop dinas	ktk	8	40,000		320,000		320,000
18		Kwitansi dinas	bk	10	35,000		350,000		350,000
19		Buku agenda masuk/keluar	bh	30	20,000		600,000		600,000
20		Ekspedisi cetak	lbr	6	11,000		66,000		66,000
21		Amplob BKPM&PPT	bh	800	1,600		1,280,000		1,280,000
22		Map BKPM&PPT	bh	100	4,000		400,000		400,000
23		Peta Inspektasi	bk	300	20,000		6,000,000		6,000,000
24		Map Investasi	bk	200	20,000		4,000,000		4,000,000
		JUMLAH							53,771,000

Padang, 30 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, Ap, M. Si
NIP. 19740618 199311 1 001



DAFTAR REKAPITULASI NILAI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA PER 30 DESEMBER 2016

SKPD : BKPM&PPT

No	Uraian	Dasar Penilaian Aset							Harga pembelian tahun 2006 s/d 2016
		Saldo per 31 Des 2016	Nilai pada saat Neraca Awal Tahun 2005	Nilai Apraisal 2011	Nilai Apraisal 2012	Nilai Apraisal 2013	Nilai Apraisal 2014	Nilai Apraisal 2016	
1	2	3 = (4+5+6+7+8+9+10)	4	5	6	7	8	9	10
A	TANAH	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
B	PERALATAN & MESIN	3,012,671,221.00	326,360,404.00	-					2,686,310,817.00
C	GEDUNG & BANGUNAN	-	-	-					-
D	JLN,JARINGAN & IRIGASI	NIHIL							
E	ASET TETAP LAINNYA	10,255,000.00	-						10,255,000.00
F	ASET LAINNYA	479,402,800.00	-						479,402,800.00
	Jumlah	3,502,329,021.00							

Padang, 30 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M.Si
NIP. 19740618 199311 1 001



DAFTAR BELANJA MODAL TAHUN 2016
(DAFTAR PENGADAAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA TAHUN 2016)

SKPD : BKPM & PPT

No.	Uraian	No, tgl SP2D/kuitansi	No, Tgl Kontrak	Nama Rekaman	Jk. Waktu Pelaksanaan	No. Tgl BAST	Lokasi Barang	Panjang/Luas	Merk/Type	Jumlah Unit	Harga Satuan	Total Harga	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah				-	-	-						
	Sub Total				-	-	-					-	
2	Peralatan dan Mesin												
1	AC	039/02 11 Feb 2016		AD Elektronik		01/BA/BKPM&PPT-2016	Kantor BKPM&PPT		Panasonic	3	8,250,000	24,750,000	
2	Printer	143/02 19 Feb 2016		Wayu Com		03/BA/BKPM&PPT-2016	Kantor BKPM&PPT		Epson	1	3,100,000	3,100,000	
3	UPS	146/02 19 Feb 2016		Wayu Com		07/BA/BKPM&PPT-2016	Kantor BKPM&PPT		ICA	1	1,650,000	1,650,000	
4	Printer	148/02 19 Feb 2016		Wayu Com		09/BA/BKPM&PPT-2016	Kantor BKPM&PPT		HP	1	3,475,000	3,475,000	
5	Komputer	151/02 19 Feb 2016		Wayu Com		05/BA/BKPM&PPT-2016	Kantor BKPM&PPT		Lenovo	1	9,350,000	9,350,000	
6	Lemari Arsip	227/02 19 Feb 2016		CV. Roland Kencana		15/BA/BKPM&PPT-2016	Kantor BKPM&PPT			4	5,500,000	22,000,000	
7	Telepon (PABX)		01/SPK/BKPM&PPT/2016 21 Maret 2016	CV. Wahana Pratama Com		19/BA/BKPM&PPT-2016	Kantor BKPM&PPT		Panasonic	1	51,370,000	51,370,000	
8	Kendaraan Roda Empat Double Gardan		02/SPK/BKPM&PPT/2016 12 Mei 2016	PT. Suka Fajar		27/BA/BKPM&PPT-2016	Kantor BKPM&PPT		Mitsubishi	1	388,676,500	388,676,500	
9	Kursi Kerja Staf	040/06 13 Juni 2016		CV. Roland Kencana		34/BA/BKPM&PPT-2016	Kantor BKPM&PPT			10	1,400,000	14,000,000	
10	Meja Kerja Staf	042/06 13 Juni 2016		CV. Roland Kencana		31/BA/BKPM&PPT-2016	Kantor BKPM&PPT			10	2,500,000	25,000,000	
11	Tabung Racun Api	206/10 21 Des 2016		CV. Konseptio			Kantor BKPM&PPT		12 Kg	3	2,765,000	8,295,000	
12	AC	442/12 29 Des 2016		AD Elektronik			Kantor BKPM&PPT		2 PK	1	8,250,000	8,250,000	
13	AC	442/12 29 Des 2016		AD Elektronik			Kantor BKPM&PPT		1 PK	1	4,400,000	4,400,000	
	Sub Total											564,316,500	
3	Gedung dan bangunan				-	-	-						
	Sub Total											-	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan												
	Sub Total											-	
5	Aset Tetap Lainnya												
	Sub Total											-	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan												
	Sub Total											-	
	Jumlah Keseluruhan											564,316,500	

Padang, 30 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M.Si
NIP. 19740618 199311 1 001



DAFTAR BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISIR TAHUN 2016

SKPD : BKPM&PPT

No	URAIAN	No, tgl SP2D/Kuitansi	No, Tgl Kontrak	Nama Rekanan	Merk/Type	Jumlah Unit	Harga Satuan	Total Harga	Ket
A	BM. TANAH								
1									
2									
B	BM. PERALATAN & MESIN								
1									
2									
C	BM.GEDUNG & BANGUNAN				NIHIL				
1									
2									
D	BM. JLN, IRIGASI & JARINGAN								
1									
2									
E	BM.ASET TETAP LAINNYA								
1									
2									
	Jumlah								

Padang, 30 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M.Si

NIP. 19740618 199311 1 001



DAFTAR BELANJA BARANG DAN JASA YANG DIKAPITALISIR TAHUN 2016

SKPD : BKPM&PPT

No	URAIAN DIKAPITALISIR KE JENIS ASET TETAP & ASET LAINNYA	No. Tgl SP2D Kuitansi	No. Tgl Kontrak	Nama Rekanan	Merk/ Type	Jumlah Unit	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
A	KE TANAH :							
B	KE PERALATAN & MESIN :							
1	Update Sistim Informasi Spasial Penanaman Modal	3337/SP2D-LS-2016 31 Oktober 2016	04/SPK/Updating/Pro- BKPM&PPT/VIII-2016 01 Agustus 2016	CV. Hangtuh Konsultan		1	39,333,800	
C	KE GEDUNG & BANGUNAN :							
D	KE JLN,IRIGASI & JARINGAN :							
E	KE ASET TETAP LAINNYA :							
F	KE ASET LAINNYA :							
	Jumlah						39,333,800	

Padang, 30 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M.Si

NIP. 19740618 199311 1 001

DAFTAR PENGHAPUSAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA TAHUN 2016

SKPD : BKPM&PPT

NO	NO SK GUB/NAMA BARANG	ASET TETAP				ASET LAINNYA			
		Peralatan dan Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Aset Tidak Berwujud	Aset Tidak Bermanfaat	Aset Dimanfaat kan Pihak lain	Aset Dalam Penelusuran
1	SK GUB No 030 - 1429 - 2016 TGL 29 Desember 2016						108,725,675.00		
1	Komputer						3,743,000		
2	Printer						1,170,000		
3	Kursi						78,000		
4	AC						10,000,000		
5	Kursi Pakai Tangan						274,000		
6	Sofa Tamu						3,337,704		
7	Meja 1/2 Biro						405,571		
8	AC						4,750,000		
9	AC						4,750,000		
10	Komputer						7,100,000		
11	Komputer						11,500,000		
12	Printer						7,400,000		
13	Printer						1,170,000		
14	Meja Biro						462,000		
15	Kursi						156,000		
16	Komputer						5,400,000		
17	Printer						6,110,000		
18	AC						1,915,000		
19	UPS						900,000		
20	UPS						3,300,000		
21	Meja 1/2 Biro						1,622,400		
22	Rak Kayu						2,808,000		

NO	NO SK GUB/NAMA BARANG	ASET TETAP				ASET LAINNYA			
		Peralatan dan Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Aset Tidak Berwujud	Aset Tidak Bermanfaat	Aset Dimanfaat kan Pihak lain	Aset Dalam Penelusuran
23	Komputer						7,000,000		
24	AC						20,000,000		
25	Mesin Tik						749,000		
26	Kalulator						500,000		
27	Filling cabinet						811,000		
28	Maja Staff						924,000		
29	Kursi						78,000		
30	Telepon						312,000		
	Jumlah	0	0	0	0	0	108,725,675.00	0	0

Padang, 30 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M.Si

NIP. 19740618 199311 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BKPM & PPT PROVINSI SUMATERA BARAT
PENJELASAN PERBEDAAN LRA DAN LO TAHUN 2016**

Kode Rekening	Uraian	LRA	LO	Selisih	Keterangan		
2.1.1	Belanja Pegawai	4,197,541,104.00	4,221,785,247.00	(24,244,143.00)	Berupa selisih pencatatan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan November dan Desember 2015 dan 2016		
					Utang belanja pegawai	184,223,225.00	
					Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja-LO (pembayaran utang belanja pegawai 2015)		184,223,225.00
					Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	208,467,368.00	
					Utang belanja pegawai		208,467,368.00
						(24,244,143.00)	(24,244,143.00)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3,522,765,940.00	3,558,896,889.00	(36,130,949.00)	Berupa selisih pencatatan jurnal penyesuaian yang terdiri dari:		
					Semester I		
					Beban jasa telepon		606,182.00
					Beban jasa listrik		7,276,502.00
					Beban persediaan ATK	61,500.00	
					Beban persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	785,000.00	
					Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	2,500,000.00	
					Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		322,000
					Beban Cetak	73,428,000.00	
						76,774,500.00	8,204,684.00
					Semester II		
					Beban persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	225,000.00	
					Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	368,000.00	
					Beban Cetak		11,610,000
					Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	10,000,000.00	
					Beban persediaan ATK		3,247,500.00
					Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran		45,000.00

					Beban jasa telepon	923,207.00	
					Beban jasa listrik	7,381,226.00	
					Beban jasa kawat/faksimili/internet	2,900,000.00	
					Beban jasa konsultasi design		39,333,800.00
						21,797,433.00	54,236,300.00
2.1.3	Belanja Modal	564,316,500.00	-	564,316,500.00	Belanja modal hanya terdapat di LRA dan bukan merupakan bagian dari LO		

Padang, 30 Desember 2016

Kepala BKPM&PPT Prov. Sumbar,

Maswar Dedi, AP, M.Si
NIP. 19740618 199311 1 001